Sudah Terdaftar
di Dewan Pers.
Surat Izin Penerbitan
Usaha Pers : SK Menkum Ham
Nomor : AHU-0017644.AH.01.01
Tahun 2022

Media Online : suaramedianasional.co.id SuaraMedia NasionalCom @smedianasional

Surat Kabar Umum

Suara Media Nasional

Bersama Membangun Daerah

Edisi 540
Tahun XV / 8 - 21 Mei 2023

Harga Rp. 7000,-
Luar Jawa Harga Rp. 12.000,-

Presiden Jokowi Minta Warga Laporkan Jalan Rusak di Daerah Lewat Twitter

"Apabila jalan di daerah Anda masih rusak parah dan sudah lama tidak diperbaiki, sampaikan kepada saya melalui kolom komentar dan kirim video melalui pesan langsung di akun Twitter ini (red: @jokowi)."

Presiden Joko Widodo beserta rombongan saat meninjau salah satu jalan rusak di Lampung

Lampung, SMN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada warga untuk melaporkan jalan rusak di daerahnya setelah kunjungan ke Lampung.

Presiden Jokowi mengunjungi Lampung pada Jumat (5/5/2023).

Alih-alih melewati jalanan yang sudah diperbaiki beberapa hari terakhir, Presiden Jokowi memilih un-

Bersambung di Hal. 11

Logo Dewan Pers

Dewan Pers: Menjaga Kemerdekaan Pers di Era Gempuran Platform Digital Jadi Tantangan Besar

Jakarta, SMN - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan saat ini perusahaan pers tengah berhadapan dengan dominasi platform digital global dalam distribusi konten. Hal ini menjadi tantangan besar yang harus dapat dilalui.

"Sungguh merupakan tantangan besar untuk menjaga kemerdekaan pers, manakala banyak perusahaan pers justru dependent dan tidak berdaya berhadapan dengan platform digital," ungkap Ninik ke-

Bersambung di Hal. 11

Wakil Ketua DPR RI Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin)

Gus Imin Apresiasi Gerak Cepat Pemerintah Evakuasi WNI di Sudan

Jakarta, SMN - Pemerintah bergerak cepat dalam melakukan pemulangan atau proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Sudan. Wakil Ketua DPR RI Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) pun mengapresiasi langkah cepat pemerintah tersebut.

"Saya mengapresiasi langkah cepat pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri dan TNI dalam mem-

Bersambung di Hal. 11

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto

Menteri Hadi Sebut PTSL Naikan Nilai Ekonomi: Perekonomian Rakyat Berkembang

Jakarta, SMN - Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan nilai tambah ekonomi sebesar kurang lebih Rp5.219 triliun pada perekonomian Indonesia.

Hal itu disampaikan saat menyerahkan sertifikat aset Barang Milik Daerah (BMD) dan Barang Milik Negara (BMN), sertipikat aset PT PLN (Persero), ser-

Bersambung di Hal. 11

"Berantas Rokok Ilegal" Satpol PP Jombang Sosialisasi Perundang Undangan Bidang Cukai Tahun 2023

Jombang, SMN - Sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai yg di selenggarakan Satpol PP kabupaten jombang dibuka Wakil Bupati Sumrambah. Dihadiri perwakilan Kantor Bea Cukai Kediri, Camat Kapolsek, Danramil dari Kecamatan Mojowarno, Bareng, Ngoro dan Wonosalam serta diikuti oleh 240 anggota satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) dari empat kecamatan. Bertempat di WTC Wonosalam Kabupaten Jombang, Kamis (23/2/2023).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Thonsom Pranggono menyampaikan bahwa sosialisasi perundang undangan dibidang cukai berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Indonesia nomor 215 PMK.07/2021 tentang penggunaan pemantauan monitoring dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

"Selanjutnya sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906.21.14/SJ hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi modifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait dengan BLK tahun 2022 dibiayai tahun anggaran 2022 usulan Kemendikbud dan Kemenkes. Yang ketiga, surat edaran Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Nomor 03/DJ/22 pedoman kerja sarana penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau," terangnya.

Sedangkan yang keempat, peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 lembaran daerah kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 7 bagian A.

"Sedangkan kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai bertujuan untuk meningkatkan, mengoptimalisasikan alokasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sehingga dapat bermanfaat sebesar-besarnya langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jombang serta meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat Kabupaten Jombang terkait pemberantasan bakau dengan cukai ilegal," jelas Thonsom.

Sementara itu Wakil Bupati Jombang Sumrambah dalam sambutannya menyampaikan, rokok menjadi permasalahan

Sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai yang di selenggarakan Satpol PP kabupaten jombang ini dibuka oleh Wakil Bupati Jombang, Sumrambah

Foto bersama usai acara sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai yang digelar di WTC Wonosalam Kabupaten Jombang, Kamis (23/2/2023).

yang dilematis bagi pemerintah. Di satu sisi rokok membahayakan kesehatan, namun di sisi lain rokok menjadi tumpuan karena menyumbang pendapatan negara yang cukup besar sekitar 200 Trilyun. Untuk itu,dalam proses penanganan pencegahan peredaran Rokok ilegal melibatkan Linmas karena banyak beredar rokok ilegal di masyarakat.

"Ciri – ciri Rokok ilegal yang tidak ada cukai diantaranya rokok ilegal meliputi tidak dilengkapi pita cukai, memakai pita palsu/cetak kertas palsu Memakai pita pabrik lain, Merk tidak resmi/tidak terdaftar di Bea Cukai, dan buatan pabrik tanpa izin. Selain mencegah peredaran rokok ilegal, saya minta kepada masyarakat agar menjaga kampungnya masing – masing agar suasana kampung kondusif dan damai segingga bisa mengurangi kenakalan remaja," harapnya.

Di tempat yang sama, Perwakilan dari Bea Cukai Kediri Rudi mengatakan bahwa capaian penerimaan negara sebanyak Rp 36.772.113.550.674 tersebut dari bea masuk dan cukai. Untuk target bea masuk pada 2022 adalah Rp 6.467.028.339 sedangkan cukai Rp 36.765.646.522.335. Sedangkan untuk cukai capaiannya 100,90 persen dari wilayah kerja yang terdiri dari Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk.

"Sosialisasi ini merupakan tindakan preventif untuk menurunkan tingkat peredaran rokok ilegal yakni sinergi dengan Satpol PP Jombang. Kami juga tetap berupaya maksimal, sehingga pada 2023 ini lebih tertib. Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melapor jika ada aktivitas masyarakat terkait dengan rokok ilegal," tandasnya.(adv/kan)

Surat Kabar Umum
Suara Media Nasional
Bersama Membangun Daerah
Edisi 540/ XV / 8 - 21 Mei 2023

Pemdes Purworejo Laksanakan Pengaspalan Jalan untuk Mempermudah Akses Masyarakat

Akses jalan di Dusun Purworejo yang sudah di aspal

Blitar, SMN - Pemerintah Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon telah melaksanakan kegiatan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur yaitu pengaspalan jalan yang berada di dusun purworejo, yang mana pengaspalan jalan ini merupakan akses bagi masyarakat khususnya untuk para petani.

Gunawan Sekretaris Desa Purworejo menyampaikan, Jum'at (05/05), untuk tahun 2023 ini Pemerintah Desa Purworejo melalui dana desa telah melaksanakan pengaspalan jalan diwilayah dusun purworejo sepanjang 574 meter.

Jalan ini melintas disepanjang area persawahan, sehingga secara fungsi merupakan akses perekonomian masyarakat yang di gunakan untuk meningkatkan perekonomian dibidang pertanian, sehingga dengan diaspalnya jalan ini akses keluar masuk para petani pada saat panen menjadi lancar," jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan Gunawan, pengaspalan jalan ini merupakan usulan dari masyarakat sejak tahun 2020, karena terkendala pandemi covid-19 sehingga terjadi refocusing anggaran, akhirnya bisa dilaksankan di tahun 2023.

Diharapkan dengan adanya pengaspalan jalan ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, karena akses keluar masuk hasil pertanian menjadi meningkat serta ini merupakan akses jalan lingkungan yang masuk kepada jalur ekonomi yang berada di wilayah Desa Purworejo," ungkap Gunawan.

Terakhir, Gunawan berpesan kepada masyarakat disekitar pengaspalan jalan supaya turut serta untuk merawat dan menjaga jalan ini supaya bisa awet terpelihara dengan baik, sehingga masyarakat bisa ikut serta memiliki, memelihara dan mengawasi jalan disepanjang lintas selatan jalur persawahan yang berada di dusun purworejo ini," pungkasnya.(mam)

Wali Kota Blitar Hadiri Rapat Paripurna Bahas Dua Agenda Penting

Blitar, SMN - Wali Kota Blitar Drs. H. Santoso, M.Pd menghadiri Rapat Paripurna yang diselenggarakan DPRD Kota Blitar di ruang Paripurna DPRD, Jumat (05/05/2023) pagi.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim dan juga dihadiri Wakil Walikota Blitar Tjutjuk Sunario, Sekda Kota Blitar, Forkopimda, anggota DPRD Kota Blitar, sejumlah kepala OPD Pemkot Blitar, asisten, staf ahli dan Camat itu membahas dua agenda penting.

Kedua agenda itu yakni Penjelasan DPRD Atas Raperda Tentang Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan dan Raperda Tentang Kemudahan Pelindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, serta Penetapan Persetujuan Bersama Terhadap Raperda Tentang Fasilitasi Pesantren.

Wali Kota Santoso mengatakan aripurna kali ini dalam rangka inisiatif Perda yang diusulkan oleh DPRD yaitu Raperda Tentang Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan dan Raperda Tentang Kemudahan Pelindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Raperda Fasilitasi Pesantren.

"Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan bersama laporan dari Pansus, juga pemerintah daerah sangat mendukung dengan tiga Raperda," kata Santoso kepada awak media usai paripurna.

Wali Kota Blitar juga berhadap, nanti dalam implementasinya Perda yang sudah diparipurnakan akan segera disampaikan ke Gubernur untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Ia menyebutkan, soal rekomendasi dari Pansus juga sangat relevan, mengingat selama ini pemerintah sudah banyak melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan Perda tentang wawasan kebangsaan.

Suasana Rapat Paripurna

"Contoh, diselenggarakan acara grebeg Pancasila, kemudian pendidikan wawasan kebangsaan dan sebagainya, itu semua sangat relevan," jelasnya.

Soal Raperda tentang Fasilitasi Pesantren, lanjutnya, Pemerintah Kota Blitar juga sudah memfasilitasi kolaborasi dan sinergitas dengan Pondok Pesantren sangat intens.

"Ini juga sejalan dengan visi yang saya sampaikan bagaimana Blitar yang "KEREN" yaitu Keberagamaan, Religius dan Nasionalis sejalan dengan konsep yang dituangkan ke dalam Raperda tentang Fasilitasi Pesantren," imbuhnya.(mam)

May Day, Ketua DPRD Nganjuk Siap Fasilitasi dan Pintu Terbuka Lebar bagi Aspirasi Buruh

Nganjuk, SMN – Senin (1/5/2023) dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menerima perwakilan gabungan kelompok buruh dari berbagai elemen di Kabupaten Nganjuk.

Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono yang didampingi oleh Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi serta Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad saat menerima aspirasi buruh di gedung DPRD Nganjuk mengatakan bahwa pihaknya selalu siap membuka pintu selebar-lebarnya dan siap memfasilitasi aspirasi buruh.

Ketua DPRD Nganjuk (tengah) didampingi Bupati Nganjuk serta Kapolres Nganjuk saat menerima aspirasi buruh di gedung DPRD Nganjuk

"Sebagai representasi dari rakyat, kami (DPRD Nganjuk) siap memfasilitasi aspirasi dari buruh," ujar Tatit saat menerima perwakilan buruh di gedung DPRD Nganjuk.

Tatit juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menjadi pengawas bila ada permasalahan buruh yang tidak bisa terselesaikan.

"Kami selalu membuka diri terkait permasalahan buruh di Nganjuk, ketika ada permasalahan yang masih sulit terselesaikan kami akan menjadi pengawas dan berkomunikasi dengan eksekutif agar semua permasalahan buruh di Nganjuk dapat diselesaikan dengan baik," lanjut Tatit Heru Tjahjono Ketua DPRD Nganjuk.

Tidak lupa Tatit juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan semuanya, khususnya para buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional di gedung DPRD Kabupaten Nganjuk ini.

"Selamat Hari Buruh Internasional.Terima kasih atas kehadirannya dalam menyampaikan aspirasi dengan aman,terkendali dan kondusif. Terima kasih semuanya," pungkas Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono.

Sementara Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengatakan bahwa perlindungan ketenagakerjaan sudah ada payung hukumnya.

"Sekarang masih proses evaluasi dan fasilitasi di kantor Gubernur, semoga cepat turun yang diberlakukan untuk buruh di Nganjuk," ucap Marhaen.

Marhaen juga mengungkapkan bahwa UMK di Nganjuk tahun kemarin naik 10 persen.

"Ini hasil dari dewan pengupahan dan buruh bersama-sama saling mengusulkan," lanjutnya.

"Untuk tahun 2024 kami akan optimalkan untuk kenaikan UMK di Nganjuk, dan kita akan koordinasikan dengan pengawas yang ada di provinsi," tandas Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.(yan)

Jalin Silaturahmi, Kapolres Nganjuk Bersama Dandim 0810 Nganjuk dan Kajari Nganjuk Kunjungi Ponpes

Kapolres Nganjuk, Dandim 0810 Nganjuk dan Kajari Nganjuk beserta jajaran saat silaturahmi di Ponpes Gedongsari Prambon Nganjuk

Nganjuk, SMN - Rabu (3/5/2023) Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad bersama Dandim 0810 Nganjuk Letkol (Inf) Tri Joko Purnomo serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk Alamsyah mengunjungi pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) Gedongsari Prambon Nganjuk, turut hadir tokoh agama dan ketua perguruan silat tingkat Kabupaten Nganjuk.

Dalam kesempatan ini Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad menyampaikan bahwa silaturahmi ini merupakan upaya bersama untuk menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah Kabupaten Nganjuk dalam memasuki tahun politik.

Kapolres Nganjuk juga berharap kepada seluruh pengurus dan simpatisan perguruan silat agar mematuhi aturan yang telah disepakati dalam instruksi bersama Forkopimda untuk "Jogo Nganjuk".

"Jangan mau diadu domba oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab serta yang sengaja memanfaatkan kegaduhan untuk kepentingan diri sendiri," kata AKBP Muhammad.

Kapolres Nganjuk juga menambahkan untuk selalu memanfaatkan layanan "Wayahe Lapor Kapolres (WLK)" di nomor 081331342003 untuk menginformasikan mengenai kejadian tindak pidana maupun gangguan kamtibmas diwilayah Kabupaten Nganjuk.

"Untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk, ayo manfaatkan layanan Wayahe Lapor Kapolres untuk menginformasikan tentang kejadian tindak pidana dan gangguan kamtibmas," pungkas Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad.

Selain mengunjungi Ponpes Gedongsari Prambon, Kapolres Nganjuk bersama Dandim 0810 Nganjuk dan Kajari Nganjuk beserta rombongan juga mengunjungi Pondok Modern Sumber Daya At Taqwa (Pomosda), Ponpes Krempyang dan Ponpes Al Fattah yang berada di Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk. (yan/gung)

DPRD Ngawi Gelar Paripurna, Sahkan PAW Anggota Fraksi PKS

Ngawi, SMN - Paripurna istimewa digelar DPRD Kabupaten Ngawi untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) salah satu anggota Fraksi PKS atas nama Siswanto, Jumat (28/4/2023). Siswanto telah mengundurkan diri serta digantikan Lilik Kurniawati.

Rapat Paripurna pengambilan sumpah dan janji Lilik Kurniawati itu dihelat di hari yang sama usai DPRD menggelar rapat paripurna Penyampaian Rekomendasi atas LKPJ Bupati tahun 2023.

Hadir pada rapat paripurna itu, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, dan Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Sekretatis Daerah Mokh. Sodiq Tri Widyanto, berikut jajaran OPD serta seluruh anggota DPRD dan Forkompimda.

Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar mengatakan, Fraksi PKS menempatkan Lilik pada posisi Siswanto sebelumnya yakni di Komisi I, serta duduk sebagai anggota Badan Kehormatan.

"Porsi jabatan yang pernah diduduki oleh Siswanto di Komisi 1 dan di Badan Kehormatan juga digantikan oleh anggota yang baru dilantik ini. Namun, manakala ada usulan perubahan komposisi dari Fraksi PKS tentunya akan melalui paripurna lagi," terang Heru Kusnindar.

Heru menambahkan, fraksi berhak menempatkan anggota mereka menduduki komisi di DPRD termasuk tidak ada larangan bagi fraksi untuk melakukan pergeseran pada anggotanya.

Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah dan Janji Lilik Kurniawati sebagai anggota DPRD Ngawi, Jumat (28/4/2023).

"Sampai sejauh ini belum ada usulan Fraksi PKS mengubah penempatan anggota mereka yang duduk komisi maupun di alat kelengkapan dewan," ungkap Heru.

Heru Kusnindar juga berharap, Lilik Kurniawati sebagai anggota baru di DPRD Ngawi segera menyesuaikan diri dengan peran dan fungsi yang diembannya. Serta segera beradaptasi dengan tugas-tugas sebagai anggota DPRD Ngawi. (ari)

Penerbit :
PT. SUARA MEDIA NASIONAL BERSINAR
Surat Izin Usaha Penerbitan Pers :
SK Menkum Ham Nomor : AHU-0017644. AH.01.01 Tahun 2022.

Penanggung jawab :
Kanti Wiyoto

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. **Kantor Redaksi:** Jl. Brigjend Pol. Imam Bachri No.143 Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur. **Telp./Fax:** (0354) 2897707. **Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I:** Rahmat Ardianto, SH. **Dewan Penasehat:** KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri). **Ombosman :** Mujianto SE. **Komisaris Utama:** Dimas Bekti S. **Direktur Utama:** Winarti. **Wakil Direktur:** Kanti Wiyoto. **Pimpinan Redaksi/Penanggung Jawab:** Kundari Pri S. **Wakil Pimred:** Yon Taufik Hidayat. **Bendahara:** Istianingsih. **Dewan Redaksi:** Kanti, Winarti. **Redaktur Pelaksana:** Kundari Pri Susanti S.T., Hartono Basingkem, Mardianto, Setiawan. **Redaktur:** Edi Sunarko RD, Munjidul Ibad. **Humas:** Futi'ah SE. **Fotografer:** Wendy Eko Winarto. **Desain/ Layout:** Taufik Ismail, Yusuf, Istianingsih. **Manager Marketing:** M. Edy Fathurokim, M. Yusuf Maulana. **Marketing**: Kharis Abdullah, Irwan (Freelance). **Kepala Koordinator Liputan Jawa Timur:** C. Junaedi. **Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri:** Agus Wahyu, Puguh Santoso. **Blitar Kota/Kab :** Agus Imam S. **Tulungagung/Trenggalek :** Yusuf. **Bangkalan, Pamekasan, Sampang:** Wahyudi Hermawan. **Kabiro Surabaya :** Dani Prayudi. **Sidoarjo** : Indra Gunawan (Kabiro). **Mojokerto :** Slamet W. **Jombang :** Puji, Arif, **Nganjuk :** E. Widyantoro, BF Agung W. **Madiun/Ponorogo :** Drs. Suyanto. **Ngawi:** Kundari Pri Susanti S.T. **Kota/Kab. Probolinggo:** Edi Sunarko RD. **Lumajang :** Rochimawati. **Perwakilan Jawa Tengah :** Suroto Anto S. **Kab. Batang :** Paimin Nugroho (Kabiro). **Kab. Rembang :** Orsal. **Kabiro Jepara :** Petrus Paranto. **Pekalongan Raya :** Subekhi. **Bandung:** Aldi R Panjaitan. **Biro Sukabumi:** Roby Cahyadi (biro). **Malang Raya :** Henny. **Pasuruan Raya :** Irfianto (Kabiro), Haidir Sabaruddin. **Perwakilan Kaltim dan Kaltara :** Syahraini. **Kabupaten Karimun :** Timbul Maradona. H. **Biro Tanjung Pinang :** J. Parlindungan Hutasoit. **Sulawesi Selatan :** Andi M. **Batam:** Parulian Halomoan Sipayung. **Perwakilan Riau :** Marudut Daud Purba. **Perwakilan Bengkulu :** Burhanudin. **Koordinator Wartawan Jakarta :** Parulian Tambun. **Perwakilan Sumatera Utara :** Jobni Roha. **Kabiro Depok dan Bogor:** Diddy Kurniawan. **Kabiro Kab. Asahan :** Imran Nasution. **Kabiro Bengkalis :** Hendra.

No.Rekening **Bank BRI Capem Wates Kabupaten Kediri. Norek. 2289-01-000474-30-2 A/N Suara Media Nasional Bersinar**. No.Rekening **Bank Jatim Cabang Kediri Norek. 0061042661 A/N Suara Media NasionalBersinarPT. Website : www.suaramedianasional.co.id. Email : suaramedianasional@gmail.com. Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya, Alamat Percetakan :** Jl. Brigjend Katamso No. 45, Waru Sidoarjo Jawa Timur . **Telp. (031) 8678308.** Isi diluar tanggung jawab percetakan.. **Waspadai Waratawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Press yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi.** Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta Informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami dengan identitas diri ke Kantor Pusat "SUARA MEDIA NASIONAL" di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp. Fax.(0354) 2897707, 081333002657, 085645867811. **Admin SMN** :081230908358. Kami hanya memuat iklan berdasarkann order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi "SUARA MEDIA NASIONAL". ***Tidak dibenarkan meminta imbalan sesuatu dari narasumber.***

Semua Wartawan SKU Suara Media Nasional dilengkapi dengan Kartu Pers Surat Tugas, Surat Penempatan dan tercantum didalam box redaksi di atas.
Kami mohon kepada sumber berita supaya bijak dan teliti untuk menanyakan identitas wartawan yang datang.
Wartawan SKU Suara Media Nasional dalam menjalankan tugas dilengkapi dengan tanda pengenal,
dilarang terima suap, punya hak tolak jawab, dilarang melakukan pengancaman dan pemerasan, dilarang terlibat aktivitas kriminal.
Jika ada yang mengatasnamakan SKU Suara Media Nasional namun tidak tercantum dalam Box Redaksi atau ada tindakan yang dinilai merugikan pihak lain dengan tindakan melanggar hukum positif Indonesia, dapat menghubungi kontak yag tersedia.
Wartawan SKU Suara Media Nasional tidak diperkenankan menerima dan atau meminta imbalan dengan alasan apapun dari Narasumber.
TIDAK TERCATAT DI DALAM BOX REDAKSI INI BUKAN WARTAWAN KAMI..!!!

"Jika pers merugikan,jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers"
Pesan ini disampaikan Suara Media Nasional (Dewan Pers).
Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8. Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Telp. (021) 35214874. 3504874-75. Fax. (021) 3452030
Email : **dewanpers@cbn.net.id.** Twitter : **@dewanpers.or.id / www.persscouncil.or.id**

Salami Warganya, Mas Dhito Sampaikan Permintaan Maaf dan Bertekad Terus Perbaiki Kinerja

Bupati Hanindhito Himawan Pramana saat acara halal bihalal bersama warga Kabupaten Kediri di Pendopo Panjalu Jayati, Selasa (2/5/2023).

Kediri, SMN - Bupati Hanindhito Himawan Pramana bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri mengikuti acara halal bihalal bersama warga Kabupaten Kediri di Pendopo Panjalu Jayati, Selasa (2/5/2023).

Acara bertajuk Ngleneer Ning Pendopo & Halal Bihalal Bareng Mas Bupati yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB itu dihadiri belasan ribu warga dari berbagai latar belakang, termasuk pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

"Hari ini saya bersama jajaran Forkopimda menyambut warga masyarakat Kabupaten Kediri dalam suasana halal bihalal. Pada prinsipnya segala kekurangan yang ada pada kami di tingkat pimpinan daerah mohon dimaafkan," kata Mas Dhito.

Selain jajaran dari Forkopimda, turut mendampingi Mas Dhito dalam menemui warga, Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa. Hingga siang mereka dengan hangat menyambut dan menyalami satu persatu warga yang terus berdatangan.

Menurut Mas Dhito menjadi komitmen dirinya di Pemerintah Kabupaten Kediri dan jajaran Forkopimda untuk bekerja maksimal melayani masyarakat di Kabupaten Kediri. Pun demikian pihaknya tak memungkiri, selama 2 tahun lebih menjabat bupati tentunya masih terdapat kekurangan.

"Kami terus berupaya untuk memperbaiki kinerja kami ke depan," tegasnya.

Mas Dhito mengakui, acara halal bihalal di Pendopo Panjalu Jayati tersebut terbuka untuk masyarakat dari berbagai kalangan. Melihat antusiasme warga yang terus berdatangan hingga siang, pihaknya menyatakan akan tetap menyambut warganya.

"Kalau masih mau ada yang datang silahkan, saya masih menunggu di pendopo hari ini," ucapnya.

Untuk menjamu warga yang datang, Pemerintah Kabupaten Kritik setidaknya menyediakan lebih dari 12 ribu porsi makanan. Melalui acara halal bihalal tersebut, diharapkan menjadi momentum kebersamaan bagi jajajaran pimpinan daerah dengan warga Kabupaten Kediri.(kmf/adv/kan)

Mas Dhito Akan Perbanyak Homestay di Desa Wisata Kabupaten Kediri

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat menghadiri acara Grebeg Syawal dan Launching Desa Wisata Sidomulyo, Kecamatan Wates, Sabtu (29/4/2023).

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat menghadiri acara Grebeg Syawal dan Launching Desa Wisata Sidomulyo, Kecamatan Wates, Sabtu (29/4/2023).

Kediri, SMN - Usai dilaunchingnya destination branding Kediri Berbudaya, saat ini bermunculan desa-desa wisata baru di Kabupaten Kediri. Melihat hal tersebut Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana berencana akan membatasi jumlah hotel di wilayahnya.

Rencana tersebut disampaikan bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu saat memberikan sambutan Grebeg Syawal dan Launching Desa Wisata Sidomulyo, Kecamatan Wates, Sabtu (29/4/2023).

Menurutnya, homestay ini dapat langsung berdampak kepada masyarakat di sekitar desa wisata. Dengan demikian ekonomi akan berputar pada masyarakat.

"Tidak menutup kemungkinan, Pemkab nantinya akan membatasi hotel. Hotel ndak boleh terlalu banyak, homestay yang banyak," ungkapnya.

Bagi desa yang memiliki destinasi wisata, lanjut Mas Dhito, kepala desa diminta menyiapkan homestay. Pihaknya juga berjanji akan terjun langsung untuk mengecek homestay dan melakukan pendampingan serta evaluasi.

Hal ini dilakukannya untuk menyambut bandara baru yang rencana akan beroperasi pada Oktober 2023 mendatang.

"Nanti kita cari di Bulan Mei-Juni ini kita lihat kapan (agenda) kosong, saya tidur di sini. Kita tes homestaynya," terang Mas Dhito.

Bupati muda berusi 30 tahun itu berharap besar Desa Wisata Sidomulyo dapat bertahan dan berkembang. Mengingat desa yang memiliki 10 Homestay tersebut berada di akses utama menuju Gunung Kelud.

"Karena desa Sidomulyo adalah salah satu desa yang dilewati untuk akses utama menuju Gunung Kelud. Maka harapan saya sangat besar sekali," pungkasnya.

Adapun destinasi wisata dan budaya yang berada di Desa Sidomulyo ini antara lain Sumber Ganggong, Kesenian Lesung, Jaranan, edukasi serta produksi Kerupuk Gadung.(kmf/adv/kan)

Mas Dhito Tegaskan Dirinya Bupati Bagi Seluruh Umat Agama

Kediri, SMN - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyatakan dengan tegas bahwa dirinya merupakan kepala daerah bagi seluruh umat beragama di Kabupaten Kediri, bukan hanya milik salah satu agama tertentu.

Pernyataan bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu disampaikan menindaklanjuti sambutan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Kediri Murtaji pada acara Dharma Santi Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945.

"Tadi dikatakan oleh pak Murtaji, bahwa kementerian agama hari ini membuktikan sebagai kementerian yang bukan kementerian agama muslim, tapi kementerian seluruh agama," ungkapnya saat menghadiri acara Dharma Santi di Candi Tegowangi, Minggu (30/4/2023).

Menurut Mas Dhito, ketika pemerintahan pusat telah membuktikan keberadaannya untuk mengayomi semua agama yang ada dan diakui di Indonesia, hal itu pula yang harus terjadi di tingkatan pemerintah daerah.

Meski di Kabupaten Kediri, penduduk mayoritas muslim, sebagai kepala daerah Mas Dhito mengaku harus dapat mengayomi dan bersikap adil bagi seluruh umat beragama yang ada.

"Bupati Kediri bukanlah bupati umat muslim (saja) tetapi bupati untuk seluruh umat. Saya harus berlaku adil dengan seluruh umat dan agama yang diakui oleh bangsa dan negara, karena itu yang menjaga persatuan negara kita, " tutur Mas Dhito.

Dalam kesempatan itu, Mas Dhito menyampaikan selamat kepada umat Hindu yang belum lama telah merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945.

Dihadapan masyarakat dari lintas agama yang hadir dan umat Hindu yang merayakan Dharma Santi, bupati muda itu menyampaikan permintaan maafnya bilamana selama dua tahun menjabat ada kebijakan-kebijakan yang belum bisa menyenangkan semua pihak.

"Tapi percayalah saya akan terus berusaha bagaimana caranya menyejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Kediri dan semua umat yang ada di Kabupaten Kediri," katanya.

Disampaikan pula oleh Mas Dhito, Pemerintah Kabupaten Kediri memiliki komitmen untuk memberikan kesejahteraan bagi guru-guru agama non formal melalui program pemberian insentif.

Program yang telah berjalan sejak 2021 itu setidaknya hingga 2022 telah menyasar 7500 guru dengan rincian 6.665 guru muslim, 835 non muslim.

"Bahkan, saya harus sampaikan bahwa dari kuota yang kita siapkan untuk agama Hindu dan lainnya itu untuk ditingkatkan lagi," pungkas Mas Dhito.

Sementara itu, dalam sambutannya Ketua PHDI Kabupaten Kediri Murtaji menyampaikan terimakasih atas perhatian yang diberikan bupati Kediri kepada umat Hindu.

Diungkapkan, selain dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan memberikan perhatian bagi umat Hindu di Bumi Panjalu seperti pemberian bantuan guru pasraman.

"Kami di Hindu mendapatkan guru pasraman, sehingga anak didik mulai karawitan, pendidikan formal itu dikelola guru pasraman," bebernya.

Selain guru pasraman, tambah Murtaji, pemerintah daerah setiap bulannya memberikan pembinaan antar lembaga Hindu. Realisasinya, setiap bulan dilakukan koordinasi antar lembaga secara bergantian untuk menata umat di Kabupaten Kediri.(kmf/adv/kan)

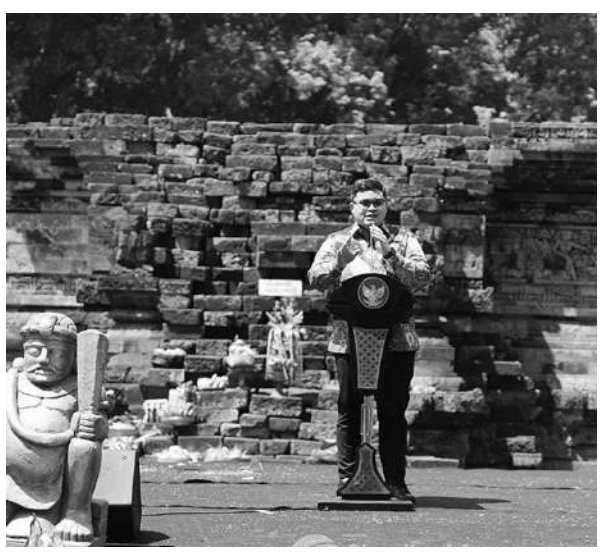

Bupati Hanindhito Himawan Pramana saat menghadiri acara Dharma Santi di Candi Tegowangi, Minggu (30/4/2023).

Mas Dhito saat apel bersama di Lapangan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Rabu (26/4/2023)

Usai Libur Lebaran, Mas Dhito Minta OPD Maksimalkan Pelayanan Publik

Kediri, SMN - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mewajibkan sektor pelayanan publik kembali dibuka maksimal usai libur Idul Fitri 2023.

Arahan ini disampaikan bupati yang akrab disapa Mas Dhito tersebut saat apel bersama di Lapangan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Rabu (26/4/2023).

Menurut Mas Dhito, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergerak di sektor pelayanan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk itu, sektor pelayanan harus dimaksinalkan di hari pertama kerja setelah libur dan cuti bersama.

"Harus dan wajib (maksimalkan pelayanan) begitu," tegasnya.

Dikatakan Mas Dhito, di hari pertama kerja tersebut pihaknya tidak akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) karena seluruh pegawai di lingkup Pemkab Kediri diyakini sudah siap bekerja.

Sidak yang biasa dilakukan, yakni menyasar pada OPD pelayanan untuk mengecek betul bagaimana jajarannya memberikan pelayanan yang prima pasa masyarakatnya.

"Hari ini saya rasa tidak perlu ada sidak. Mereka (SKPD) juga pasti siap kalau disidak hari ini. Sidaknya suatu saat nanti," ungkapnya.

Mas Dhito menambahkan, di momen hari raya ini ASN diminta untuk mampu menyelesaikan isu-isu yang berkembang di Pemkab Kediri dan masyarakat.

Di sisi lain, ASN juga dituntut untuk mampu menjalankan program prioritas yang sudah dicanangkan.

"Yang menjadi catatan, bahwa dinas, teman-teman dan rekan-rekan kerja mulai dari tingkat staf sampai kepala dinas sudah mulai harus tau apa yang menjadi program-program prioritas," ungkapnya.

Di apel tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Kediri ini sempat berbincang dengan salah satu staff yang berasal dari luar Pulau Jawa, Bambang Hendro Priono.

Semangat Bambang yang sudah kembali bekerja ini diminta untuk dapat dicontoh bagi ASN lain.

Bambang sendiri mengaku sudah satu setengah tahun tidak mudik lebaran. Pihaknya mengatakan siap bekerja dengan semangat karena rindunya terhadap keluarga sudah terbayar saat kembali ke kampung halamannya di Bitung.

Pria berusia 26 tahun itu berharap Kabupaten Kediri maju. Karena menurutnya di tahun 2022 dan 2023 banyak sekali pembangunan sektor nasional maupun provinsi yang mengambil lokus di Bumi Panjalu.

"Mudah-mudahan dengan itu membuat nama Kabupaten Kediri lebih naik lagi," pungkasnya.(kmf/adv/kan)

Halal bihalal usai apel bersama di Lapangan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Rabu (26/4/2023)

Surat Kabar Umum
Suara Media Nasional
Bersama Membangun Daerah
Edisi 540/ XV / 8 - 21 Mei 2023

Pemkot Probolinggo Berikan Santunan JKM

Probolinggo, SMN - Pemerintah Kota Probolinggo kembali serahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) untuk warganya. Jumat (5/5) siang.

Sekda Ninik Ira Wibawati kunjungi rumah almarhum Senemin di Gang Bayusari 6 Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran. Almarhum adalah Ketua RW 3 yang meninggal bulan Maret lalu. Kedatangannya untuk menyerahkan santunan JKM BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp 42 juta kepada ahli waris.

Sekda Ninik Ira Wibawati yang mewakili Wali Kota, mengatakan bahwa kepesertaan BPJS TK untuk Ketua RT dan RW ini adalah wujud perhatian pemerintah kepada masyarakat.

"Betul, jadi memang alhamdulillah pemerintah ini mempunyai program BPJS Ketenagakerjaan, jadi pemerintah terus menerus memperhatikan warganya," terangnya.

Sekda Ninik, juga mengatakan selain Ketua RT/RW, beberapa pekerja sektor informal lainnya juga diikutkan BPJS TK oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

"Pertama itu PTT (pegawai tidak tetap, red), kemudian guru ngaji, nelayan, petani saat ini UMKM, ke depan itu masih ada lagi," ungkap sekda.

Perwakilan ahli waris Adi Setiawan mengaku bersyukur atas manfaat yang keluarganya terima. Serta menyampaikan terima kasih kepada wali kota dan Pemerintah Kota Probolinggo.

"Terima kasih atas kunjungannya dan bantuan dari wali kota, dan terima kasih sudah berkunjung di rumah saya," terang Adi yang merupakan anak pertama dari almarhum.

Sekda Kota Ninik Ira Wibawati secara simbolis serahkan santunan JKM

Sebagai ahli waris, Adi juga mengatakan bahwa syarat-syarat untuk mengurus JKM dirasa cukup mudah. "Gampang, cuma sediakan berkas-berkasnya, langsung ke kelurahan, kecamatan dan langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, sekarang uang sudah diterima," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Sekda Ninik hadir didampingi oleh Camat Kanigaran Agus Rianto, Kepala BPJS TK Kantor Cabang Kota Probolinggo Lesmana Dwi Putra serta perangkat dari kecamatan dan kelurahan setempat. (ed)

Wali Kota Probolinggo Gelar Audien Dengan PKL dan LSM

Probolinggo, SMN - Pasca penertiban parkir liar dan PKL yang berjualan di jalan sekitar kawasan Alun -alun Kota Probolinggo oleh Satpol PP Selasa (2/5) lalu, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin melaksanakan audiensi dengan para PKL dan LSM, Kamis siang (4/5) di Ruang Pertemuan BPPKAD.

Didampingi oleh Wakapolresta, Kepala Satpol PP, perwakilan dari Kodim 0820 dan kepala perangkat daerah terkait. Habib Hadi menjelaskan tentang aturan yang berlaku kepada 25 perwakilan PKL yang hadir.

Walikota Hadi Zainal Abidin mengatakan, jika para PKL sudah disiapkan tempat yang representatif, yatu Pujasera lantai 1 dan lantai 2 yang lokasinya berada di sisi timur Alun- alun Kota Probolinggo.

Apabila ada yang berjualan di luar aturan yang berlaku, maka akan ditertibkan sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 5 tentang larangan bagi pedagang kaki lima malakukan kegiatan usahanya di jalan, torotar, median jalan, jalur hijau dan/atau fasilitas umum.

Sedangkan aturan parkir diatur dalam Perda Nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan parkir. "Selama belum ada perubahan, maka Perda yang ada harus tetap ditegakkan. Sedangkan untuk mengetahui permasalahan di lapangan, maka saya tampung aspirasi mereka yang sudah menempati Pujasera tersebut," ujarnya.

Sesi tanya jawab dengan PKL berlangsung sekitar 1 jam. Mereka memberikan masukan agar di lantai 2 tidak sepi pembeli.

"Lantai 2 licin, tidak ada kamar mandi serta butuh tambahan wastafel. Sempat khawatir juga dengan bangunan yang terasa bergetar," ujar Munadi Ketua paguyuban PKL.

Walikota Hadi Zainal Abidin didampingi Waka Polresta dan Kasat PolPP saat audien

Wali kota Hadi, merespons keluhan mereka tentang permintaan fasilitas ponten di lantai 2, kemudian akan dibahas lebih lanjut solusinya.

Walikota juga menegaskan sudah melalui uji kelayakan dan dinyatakan aman.

"Bagi PKL yang berjualan di luar ketentuan, jelas akan ditertibkan sesuai regulasi yang ada. Termasuk parkir liar juga ditertibkan," tegasnya.

Bagi PKL yang belum tertampung di Pujasera, akan dicarikan solusi dan dikomunikasikan dengan jajaran samping.

"Data yang ada sekitar 180 PKL, sedangkan daya tampung Pujasera tidak mencukupi. Belum lagi ada tambahan yang baru," ungkapnya.

Walikota Hadi berjanji akan memadukan data yang ada dengan kondisi riil di lapangan. Salah satu pedagang yang menempati lapak di lantai 2 pujasera mengaku dagangannya tetap dikunjungi pembeli. "Saya justru berterima kasih sudah dikasi tempat yang memadai. Kita juga harus kreatif untuk memasarkan dagangan melalui medsos, sehingga tetap dicari pembeli," ujarnya. (ed)

IPM Kabupaten Lumajang Naik Secara Signifikan

Bunda Indah

Lumajang, SMN - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan, menduduki peringkat ketiga se-Jawa Timur tercepat peningkatannya.

"Perkembangan pendidikan kita cukup bagus, IPM meskipun rangking kita tetap tetapi peningkatan pertumbuhan, kita tercepat ke tiga se jatim, ini salah satu kontributornya adalah pendidikan," ungkap Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) dalam acara Halal Bi Halal PGRI Korwil Senduro, di Halaman SDN 03 Senduro Lumajang, Kamis (4/5/2023) lalu.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tenaga pendidikan atas capaian yang telah dilakukan.

"Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran dinas pendidikan, dan seluruh tenaga pendidikan yang sudah bekerja keras," ucapnya

Wabup berharap dengan peningkatan tersebut, pemerintah terus mengupayakan peningkatan IPM terutama melalui kampanye untuk meminimalisir putus sekolah sehingga tidak berimbas pada banyaknya penikahan dini di Kabupaten Lumajang. (Tik)

Pembayaran Pajak Pasir Melalui Kartu E-Pajak Pasir Tidak Merubah Konsep Sebelumnya

Bupati dan undangan saat sosialisasi E-pajak

Lumajang, SMN - Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berupaya melakukan perbaikan terhadap pengelolaan tambang pasir. Melalui E-Pajak Pasir, pemerintah optimis Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Hal tersebut disampaikan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat membuka acara Sosialisasi E-Pajak Pasir di Panti PKK Kabupaten Lumajang, beberapa hari lalu.

"Perbaikan tata kelola pertambangan terus kita lakukan dengan segala dinamika dan problem yang terjadi. Ini sebagai langkah kami, permasalahan yang terjadi salah satunya pemalsuan berkas SKAB, ini harus kita tuntaskan," tegasnya

Bupati menjelaskan, semua hasil evaluasi pengelolaan Pajak Pasir terus dilakukan perbaikan melalui E-Pajak Pasir.

"Kita akan lakukan evaluasi dan perbaikan sistem penggunaan SKAB berbasis elektronik, ini sudah menjadi pertimbangan dari sekian persoalan yang ada, ini menjadi penertiban, ini mengurangi potensi kecurangan," ungkapnya

Sementara Kepala Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, Endhi Setyo Arifianto menjelaskan, penggunaan E-Pajak Pasir bertujuan memudahkan para wajib pajak untuk mengontrol pembayaran pajak pasir, sekaligus mengantisipasi adanya pemalsuan SKAB.

"Merubah konsep E-Pajak Pasir, ini dapat memudahkan wajib pajak dalam mengontrol hasil produksi dan meminimalisir pemalsuan SKAB," terangnya.

Dijelaskan Endi, bahwa secara teknis, pembayaran pajak pasir melalui kartu e-Pajak Pasir tidak merubah konsep sebelumnya, hanya penggunaan medianya yang berubah. Sopir yang membawa kartu e-Pajak Pasir hanya melakukan pembayaran dengan men-scan bar code yang ada di portal.

"Pembayaran menggunakan barcode lebih aman, karena dana ini nantinya langsung masuk ke RKUD, semua riwayat pembayaran akan tercantum dan tercatat oleh sistem," tutupnya. (Tik)

Kapolres Apresiasi Kekompakan Jaga Situasi Kabupaten Lumajang Tetap Kondusif

Lumajang, SMN - Kapolres Lumajang AKBP Boy Jeckson mengapresiasi kekompakan dan kerjasama jajaran TNI dan Polri dalam menjaga situasi Kabupaten Lumajang tetap kondusif. Hal ini disampaikan saat memberi sambutan dalam apel bersama dan halal bihalal Polres Lumajang-Kodim 0821 Lumajang, Selasa (2/5/2023).

"Dari semua rangkaian kegiatan selama puasa hingga pasca-Lebaran, saya dapat mengatakan kita berhasil melakukan tugas pengamanan sembari memberikan rasa aman, nyaman, dan berkesan kepada masyarakat dalam melaksanakan mudik maupun balik. Pelaksanaan pengamanan di semua lokasi wisata juga berjalan baik. Hal ini tak lepas dari kolaborasi semua pihak. Semuanya bergabung, baik dari TNI, Polri, serta semua stakeholder yang ada," kata AKBP Boy Jeckson.

"Sejak awal, saya senantiasa meyakini bahwa kita tidak akan bisa melaksanakan tugas bila bekerja sendirian. Dibutuhkan sinergisitas dan kerjasama oleh semua pihak, terutama jajaran Polres dengan Kodim 0821 Lumajang. Polres Lumajang dan Kodim 0821 Lumajang tidak terpisahkan dalam menjaga situasi Kota Pisang tetap kondusif," ujarnya.

Giat halal bihalal

AKBP Boy Jeckson juga menyebut bahwa sinergisitas dan kolaborasi tersebut merupakan nilai warisan leluhur yang harus senantiasa dipertahankan. Terkait Kabupaten Lumajang, ia juga sudah melihat sejak awal betapa hubungan baik antara petugas kepolisian dengan personel TNI sudah terjalin erat.

"Kita berdiri saat ini merupakan torehan sejarah dari para pendahulu. Bagaimana perjuangan para pahlawan yang bahu-membahu berkorban jiwa membangun bangsa, inilah warisan yang harus kita pertahankan. Dengan semangat tersebut, saya yakin TNI-Polri bisa terus menjadi garda terdepan penjaga keutuhan kapal besar bernama Indonesia," ucapnya.

"Sejak awal saya melihat hubungan TNI-Polri di sini sudah harmonis. Kapolsek dan Danramil pasti berkolaborasi, begitu pula Bhabinkamtibmas saling bergandengan tangan dengan Babinsa dalam menjaga kamtibmas. Apel dan halal bihalal bersama hari ini juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan persaudaraan karena sejatinya kita ini lahir dari rahim yang sama, yakni bumi pertiwi Indonesia," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Dandim 0821 Lumajang Letkol Czi Gunawan Indra Y. menyampaikan bahwa hubungan baik sesama personel TNI-Polri bisa menjadi modal menangkal segala bentuk permasalahan maupun provokasi.

"Saya minta seluruh jajaran TNI maupun Polri agar bersama-sama bahu membahu membangun Lumajang yang kita cintai ini. Saya minta kita semua untuk terus memupuk kasih sayang persaudaraan di wilayah Lumajang," ujarnya.

"Bila ada permasalahan di lapangan, saya berharap semuanya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Sejauh ini saya mengapresiasi soliditas TNI-Polri di Lumajang dan hal tersebut bisa menjadi modal dalam menangkal segala bentuk provokasi atau isu yang bisa merugikan institusi. Saya dan Kapolres juga selalu terbuka menerima rekan-rekan sekalian untuk menyelesaikan persoalan yang ada sampai tingkat paling bawah," tutup Letkol Czi Gunawan. (Tik)

Satreskrim Pati Ungkap Kasus Pembunuhan Bayi

Pati, SMN - Kabar viral sangat menggemparkan Kabupaten Pati terkait bayi berusia 3 bulan yang hilang pada Senin (1/5). Diduga kuat sengaja dibuang bukan diculik (hilang).

Lantaran, menurut keterangan Kasatreskrim Polresta Pati, Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar, kasus ini jika diruntut sangat mirip dengan penemuan mayat seorang bayi di sungai Dukuh Kaliampo, Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo pada Selasa (2/5) petang.

"Penemuan bayi di Kaliampo ini mirip dengan kasus penculikan anak yang dilaporkan kemarin. Dugaan kuat memang itu dibuang oleh ayahnya sendiri (Ayah Tiri). Pelakunya sudah kita tangkap dan kita periksa," ucap Kasatreskrim, Selasa (2/5/2023) petang.

Pelakunya inisial SL, menurut Kompol Onkoseno, ia berhasil diamankan di kediamannya.

"Untuk bayinya, saat ini masih di RS Soewondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Modusnya masih kita dalami, soalnya ini baru saja ditangkap, kita periksa dulu, rencananya besok kami rilis," jelasnya.

Sebelum diungkapnya kasus ini, dia menceritakan jika anaknya tiba-tiba menghilang setelah ditinggal menemani anak pertamanya. Saat kembali ke rumah bayinya sudah tidak ada.

"Kedua orang tua bayi tersebut menggerakkan jagad maya (media sosial). Dengan melaporkan jika anaknya yang berusia tiga bulan telah hilang diculik," pungkasnya. (or)

Konferensi pers Polresta Pati Rabu 3 Mei 2023

Bupati Madiun Ahmad Dawami dan Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama Forkopimda dan jajaran OPD Kabupaten Madiun saat meninjau Pos Pantau Keamanan Mudik Lebaran 2023 di sejumlah titik wilayah Kabupaten Madiun juga meninjau di RSUD Dolopo Madiun yang didampingi Direktur RSUD Dolopo serta Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun

Bupati dan Wakil Bupati Madiun Bersama Forkopimda Tinjau Pos Pengamanan Mudik Lebaran 2023

"Kami cek dan pantau semua pos pengamanan yang berada di wilayah Kabupaten Madiun," ungkap Bupati Madiun, Ahmad Dawami.

Madiun, SMN - Di kegiatan peninjauan pos pengamanan mudik lebaran 2023, Pemkab Madiun membentuk dua tim yang diberangkatkan secara langsung dari Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun Rabu Malam (19/4/2023).

Tim pertama yang terdiri dari Bupati Madiun Ahmad Dawami yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Dandim 0803 Madiun, Kajari Kabupaten Madiun, Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sejumlah Forkopimda, dan jajaran OPD Kabupaten Madiun meninjau tempat-tempat di antaranya pos Dumpil (Exit tol), pos widas dan pos taman Asti Caruban dengan mengendarai kendaraan bermotor (touring).

Sedangkan tim kedua yang terdiri dari Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto, Sekda Kabupaten Madiun, Waka Polres madiun Komandan Den C Sat Brimobpda, Dan Yon 501, Forkopimda dan jajran OPD Kabupaten Madin meninjau tempat-tempat pos jiwan, pos Simpang Paogtan, RSUD Dolopo dan Pos Krapyak dengan mengendarai Bis dan mobil dinas.

Menurut Bupati Madiun Ahmad Dawami dan Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam pelaksanaan pengamanan mudik lebaran 2023 akan dipersiapkan secara maksimal baik sarana dan prasarananya.

Pihaknya mengatakan bahwa diperlukan bantuan dari semua pihak demi kesuksesan pelaksanaan pengamanan mudik lebaran ini. Tak lupa terimakasih juga diucapkan kepada petugas yang terlibat dalam pengamanan mudik lebaran.

"Kami cek dan pantau semuanya pos pengamanan yang berada di wilayah Kabupaten Madiun. Kami pastikan keperluan mudik lebaran 2023 aman dan nyaman" terangnya.

Beliau berharap agar para pemudik bisa nyaman dan menikmati layanan yang sudah disediakannya dengan baik.

"Kami atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Madiun mengucapkan terimakasih kepada seluruh petugas yang terkibat dalam pengamanan mudik lebaran tahun 2023," jelasnya.

Bupati Madiun dan Wakil Bupati Madiun berharap dan menghimbau agar para pemudik senantiasa menjaga kesehatan dan beristirahat apabila lelah dan mengantuk selama berkendaraan.

"Mengingat sebagai wilayah penghubung Kabupaten Madiun tentunya akan dilewati oleh pemudik yang akan menuju daerah sekitar seperti kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo," pungkasnya. (Sy/ ADV)

Wisata Papringan Kalikarto Menggeliat Lagi Usai Masa Pandemi

Madiun, SMN - Pemerintah Desa Singgahan, Kecamtan Kebonsari, Kabupaten Madiun menyajikan wahana wisata papringan Kalikerto yang menyajikan wisata alam, budaya, dan aneka kuliner, Minggu (23/4/2023)

Wahana wisata papringan Kalikerto tersebut sebelum masa pandemi covid 19 telah di launching oleh Bupati Madiun Ahmad Dawami hari minggu 22/9/2019) setelah itu tahun 2020 terdampak pandemi covid 19 akhirnya ditutup dan dibuka lagi usai pandemi covid 19 atau ada kelonggaran dari pemerintah pusat untuk menggiatkan obyek wisata, UMKM dalam pemulihan perekonomian masyarakat, akan tetapi harus tetap memenuhi prokes dan aturan dari pemerintah karena covid 19 masih ada.

Setelah ada kelonggaran PPKM covid 19 agar perekonomian dan kegitan masyarakat berjalan menuju normal kembali maka dari itu tempat-tempat obyek wisata UMKM dan yang lainnya mulai digerakan lagi demi pemulihan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat desa Singgahan tersebut.

Pada hari Minggu (13/11/2022)

Wahana Wisata Papringan Kalikerto, Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun

Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto mengunjungi wana wisata Papringan Kalikerto dalam agenda menggeliatkan kembali sektor pariwisata lokal Kabupaten Madiun yang sempat vakum akibat pandemi covid 19 tersebut.

Dalam acara ini diselenggarakan kegiatan senam bersama di wana wisata Kalikerto desa Singgahan tersebut. Selain itu ada beragam kegiatan yang diselenggarakannya selai senam bersama diantaranya beragam kuliner dan budaya.

Kades Singgahan Ihda Kurniawan mengatakan bahwa melihat antusias masyarakat yang luar biasa Kades Singgahan berharap kegiatan seperti ini akan dijadikan kegiatan rutinitas dalam mengisi akhir pekan.

"Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan semacam ini wana wisata Papringan Kalikerto Desa Singgahan akan menjadi bertambah ramai dan berkembang lebih baik lagi" harap Kades Singgahan Ihda Kurniawan.

Sementara itu pengelola wana wisata Kalikerto Desa Singgahan Kecamtan Kebonsari Kabupaten Madiun Arif, menyampaikan dirinya sedang mencoba untuk membangkitkan kembali wana wisata Kalikerto setelah pandemi covid 19 ini.

"Untuk itu kami mohon dukungan dan supportnya dari semua pihak untuk ikut serta membantu dan menggiatkan wana wisata kami ini demi menunjang dan memiliki kegiatan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Desa Singgahan ini" pungkasnya. (Sy)

Peringatan Hardiknas, Wali Kota Madiun: Dapat Kado Penghargaan Rekor MURI Sebagai Pemrakarsa dan Penyelanggara Pembagian Laptop Chromebook Terbanyak

Madiun, SMN - Walikota Madiun, Jawa Timur, Maidi, tidak hanya menyiapkan SDM yang berkualitas di masa sekarang. Namun, juga menyongsong Indonesia generasi emas di 2045.

Hal itu, terlihat dari kepedulian orang nomor satu di Kota Pendekar itu akan pelajar di era sekarang. Setidaknya, Pemerintah Kota Madiun memberikan total 14 ribu lebih laptop kepada pelajar SD dan SMP negeri. 9.400 di antaranya diberikan di 2023 ini.

"Ini sekaligus untuk menyiapkan generasi emas di 2045 mendatang. Anak-anak ini kan calon pemimpin di masa depan. Kita persiapkan mulai dari sekarang," kata Maidi, usai Gebyar Laptop Chromebook Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Jalan Pahlawan, Selasa 2 Mei 2023.

Walikota berharap, melalui bekal fasilitas yang lengkap itu anak-anak semakin termudahkan dalam kegiatan belajar-mengajar. Apalagi, didukung dengan program internet gratis yang menyentuh 2.375 titik WiFi dan 474 WiFi Kota Pintar.

Tak heran, walikota menyebut anak-anak di Kota Madiun sudah tidak lagi membuka jendela dunia. Namun, sudah membuka pintu dunia.

"Perubahan terus terjadi. Anak-anak jangan sampai ketinggalan dan menjadi korban perubahan. Tetapi harus bisa mengikuti bahkan ikut merubah," imbuhnya.

Walikota menambahkan, setidaknya sudah memberikan 14 ribu lebih laptop kepada pelajar. Yakni, untuk pelajar kelas 4 sampai kelas 9. Sebanyak 9.400 unit di antaranya diberikan di 2023 ini dan tercatat dalam rekor MURI sebagai pemrakarsa dan penyelanggara pembagian laptop chromebook terbanyak. Itu melengkapi sejumlah rekor lain yang sudah pernah diukir Kota Madiun.

Walikota Madiun Maidi didampingi oleh kepala dinas pendidikan kota Madiun Lismawati meraih penghargaan rekor MURI sebagai pemrakarsa dan penyelanggara pembagian laptop chromebook terbanyak yang bertempat di Pahlawan Street Center (PSC) Kota Madiun

Tak hanya itu, ia juga mendapat penghargaan secara personal. Yakni, atas komitmen dan kepedulian dalam pengembangan bidang pendidikan di Kota Madiun tahun 2023.

Penghargaan diberikan oleh Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Piagam penghargaan diberikan Rektor Unesa Prof Nurhasan kepada Maidi. Dalam rangkaian peringatan Hardiknas tersebut memang juga mengemuka orasi pendidikan oleh Rektor Unesa tersebut.

"Pemimpin yang hebat juga harus bisa mencetak calon pemimpin yang hebat pula. Melalui dunia pendidikan ini kita ingin mencetak generasi hebat di masa depan. Nah, untuk mengoptimalkannya kita berikan fasilitas laptop ini. Kalau IT kita kuasai, maka dunia akan kita genggam," pungkasnya. (Sy)

Bupati Asahan Ikuti Musrenbang RKPD Sumut 2024

Bupati Asahan H. Surya mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sumatera Utara (Musrenbang RKPD Sumut) tahun 2024

Asahan, SMN - Bupati Asahan H. Surya, ikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sumatera Utara (Musrenbang RKPD Sumut) tahun 2024 di Aula Hotel Santika Dyandra Convention Hall Medan, Rabu (12/04/2023).

Turut hadir Mewakili Menteri Dalam Negeri RI, Para Kepala Daerah Se-Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Para Pimpinan BUMN/BUMD, Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara dan para tamu undangan lainnya

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi membuka langsung acara tersebut dan menyampaikan prioritas RKPD Sumut 2024, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosial kemasyarakatan. Selain itu, Edy juga meminta peningkatan tata kelola Pemerintahan yang berkualitas dan inovatif, sehingga kualitas pemerintahan lebih baik lagi kedepannya.

Gubsu juga menjelaskan maksud Musrenbang adalah penyampaian rancangan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dan memperoleh masukan perkembangan kebijakan perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota. Dengan tujuan meningkatkan sinergitas prioritas sasaran dan mensepakati masukan penyempurnaan rancangan RKPD.

Sementara itu pasca mengikuti pembukaan Musrenbang, Bupati Asahan H. Surya BSc mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan akan mendukung segala upaya dalam mensejahterakan masyarakat Sumut, terkhusus bagi masyarakat Kabupaten Asahan.

"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Asahan mendapatkan penghargaan terbaik ke I realisasi anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Kedepannya kita harus lebih meningkatkan kinerja kita agar penghargaan – penghargaan yang lainnya bisa kita raih," ucap Bupati menutup pembicaraan. (in)

Halal Bihalal dengan Warga Ngawi Perantauan, Ajang Silaturahmi dan Perkenalkan Destinasi Wisata Serta Produk UMKM

Ngawi, SMN - Tak lupa akan daerah asal, menjadi salah satu pengikat bagi warga Ngawi di perantauan untuk selalu ingat pulang dan mengenangnya sebagai tempat terindah mereka.

Gambaran itu juga tampak saat dihelat Halal Bihalal Idul Fitri 1444 H bagi warga Ngawi perantauan di Pendopo Wedya Graha (23/4/2023). Agenda ini rutin dilakukan tiap tahun dan menjadi ajang silaturahmi dan pertemuan warga Ngawi yang sedang mudik lebaran.

"Tentunya senang sebab bisa bertemu dan bernostalgia dengan teman-teman dari masa kecil dan remaja, serta melihat indahnya Ngawi lagi," ungkap Muhammad Arif, seorang warga perantauan dsri Surabaya.

Suasana halal bihalal warga perantauan, Minggu (23/4/2023)

Agenda halal bihalal ini selalu menyedot ratusan orang warga perantauan untuk saling bertemu dan melepas kangen.

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono turut datang dan bertemu mereka serta memanfaatkan momen itu untuk mengajak warga perantauan ikut memajukan produk UMKM dan destinasi wisata. Apalagi di saat halal bihalal itu juga ada produk UMKM turut dipamerkan.

"Mewakili rekan-rekan di Pemerintah Kabupaten Ngawi, kami mohon maaf lahir batin. jangan lupa dilarisi pula produk asli UMKM Ngawi agar bisa jadi oleh-oleh saat pulang," ujar Ony Anwar Harsono.

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono juga menjelaskan, oleh-oleh dari Ngawi walau hasil UMKM, sudah menggunakan tata cara pengemasan yang cantik, praktis dan kekinian.

Sementara di kesempatan yang sama Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko mengajak warga perantauan yang hadir untuk menyempatkan diri mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Ngawi.

"Jangan lupa berkunjung ke wilayah-wilayah pariwisata di Kabupaten Ngawi," ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekda Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto, Forkopimda Ngawi, Kepala OPD, camat serta sejumlah tokoh masyarakat. (ari)

Bupati Asahan Pimpin Apel Gabungan

Asahan, SMN - Usai melaksanakan cuti bersama, memperingati Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H/2023 M, Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan Apel Gabungan Perdana yang dipimpin langsung Bupati Asahan H. Surya, di Halaman Kantor Bupati Asahan, Rabu (26/04/2023).

Dalam apel tersebut tampak hadir juga Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Para Asisten, Staf Ahli Bupati Asahan, OPD dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Bupati Asahan pada amanatnya mengatakan, sebagai ASN sudah seharusnya mematuhi apa yang menjadi ketentuan dari Pemerintah. Untuk itu, diharapkan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tupoksi yang telah diberikan.

Selain itu Bupati berpesan, agar seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dapat mengintropeksi diri untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

"Selaku Kepala Daerah, saya menginginkan prestasi kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Asahan mewujudkan Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter dapat terwujud", harapnya.

Bupati juga menegaskan, kepada ASN yang tidak hadir tanpa adanya alasan, Pemerintah Kabupaten Asahan akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Dan untuk kehadiran ASN itu sendiri pada hari pertama masuk kerja mencapai 98%", ucapnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan akan lebih meningkatkan pelayanan publik, sehingga masyarakat Kabupaten Asahan dapat terlayani dengan baik. Tak lupa Bupati mengucapkan, minal aidin walfaizin mohon maaf lahir dan bahtin, jika selama memimpin Kabupaten Asahan saya ada melakukan kesalahan.

Diakhir apel seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan yang mengikuti apel saling salam bersalaman dengan Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan. (in)

Bupati Asahan H. Surya saat memimpin Apel Gabungan Perdana

Surat Kabar Umum
Suara Media Nasional
Bersama Membangun Daerah
Edisi 540/ XV / 8 - 21 Mei 2023

Pansus Beri Rekomendasi Perbaikan kepada Bupati Sampang

Penandatangan pengesahan raperda

Sampang, SMN - DPRD Kabupaten Sampang kembali melaksanakan sidang paripurna penyampaian laporan dan rekomendasi pansus LKPJ bupati TA 2022, pengesahan Raperda pembangunan industri Kabupaten Sampang tahun 2022 - 2042 serta halal bilahal dalam rangka Idul Fitri 1444 H yang bertempat di ruang sidang paripurna DPRD setempat, Rabu (3/5).

Dalam sidang tersebut secara langsung diberikan rekomendasi tersebut kepada Bupati Sampang. Rekomendasi ini disampaikan dengan adanya saran perbaikan demi kemajuan Sampang selanjutnya.

Panitia khusus (Pansus) DPRD Sampang memberikan beberapa rekomendasi atas laporan pertanggung jawaban kerja bupati TA 2022. Dewan minta Bupati Sampang Slamet Junaidi untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus DPRD Sampang. Dalam rapat paripurna kemarin (03/5), pihaknya memberikan beberapa rekomendasi yang harus segera dijalankan dan ditindak lanjuti oleh Pemkab Sampang. Utamanya Bupati Sampang selaku pucuk pimpinan dan pemangku kebijakan. "Ini semata-mata demi mempertahankan pencapaian yang telah didapatkan dan demi kemajuan Sampang selanjutnya," ujarnya kemarin.

Dimana, rekomendasi yang disampaikan tersebut berdasarkan dari hasil pembahasan dari tim Pansus yang dilakukan dalam menindaklanjuti LKPJ tersebut. Dimana pencapaian kesuksesan pembangunan tersebut merupakan upaya maksimal dari segenap penyelenggara negara. Tugas dan tanggung jawab tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Kabupaten Sampang.

Hal sama pula disampaikan oleh Sekwan DPRD Sampang Anwari Abdullah. Dalam kesempatan itu pula digelar halal bilahal dalam rangka Idul Fitri 1444 H. Dimana DPRD sendiri telah menjalankan tahapan pembahasan mulai dari tingkat fraksi, komisi dan Pansus. "Sekretariat dewan yang menjembatani antara pemkab sampang dengan DPRD Sampang. Sehingga semuanya bisa tepat waktu," ujarnya singkat.

Dalam paripurna itu, dihadiri Bupati Sampang Slamet Junaidi, Wabup Abdullah Hidayat, Forkopimda, OPD, serta dihadiri pimpinan dan anggota DPRD dan tamu undangan lainnya. Paripurna ini digelar sebagai agenda rutin DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai badan legislatif dan pemantau kinerja pemerintah daerah. (adv/why)

Kesadaran Masyarakat Kabupaten Pasuruan dalam Laksanakan Uji Kir Meningkat

Pasuruan, SMN – Kepala UPTD pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Nanang Setyo wahyudi mengatakan kesadaran masyarakat di Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan uji Kir kendaraan bermotornya, semakin meningkat. Bahkan, peningkatannya cukup signifikan sampai 30%, menurutnya, dalam sehari tak kurang dari 50 kendaraan bermotor yang melaksanakan uji Kir.

Adapun jenis kendaraan yang wajib melaksanakan uji Kir, yakni kendaraan angkot (angkutan kota), bus dan kendaraan pengangkut barang, seperti pick up, truk dan kendaraan pengangkut barang lainnya. Uji Kir untuk setiap kendaraan tersebut sangat penting dilaksanakan, karena untuk mengetahui kondisi kendaraan, apakah memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan atau tidak.

"Untuk itu, bagi setiap kendaraan yang tidak lulus uji Kir, maka tidak boleh beroperasi. Dalam artian kendaraan tersebut harus diperbaiki jangka waktu selama 14 Hari hingga memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Kalau sudah diperbaiki, kendaraan tersebut akan dilakukan pengecekan kembali," ujar Nanang, Senin (03/05/2023).

Lebih lanjut Nanang menegaskan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat tak lepas dari pemahaman akan pentingnya keamanan dan keselamatan perjalanan kendaraan dan para penumpangnya. Nanang menghimbau kepada warga yang belum pernah mengujikan kendaraannya, untuk segera datang ke UPTD pengujian kendaraan bermotor. "Sebab pengujian hanya dilakukan dua kali dalam satu tahun dengan biaya tergantung kendaraannya apa. Biayanya hanya Rp 60. 000 untuk kendaraan seperti pick up dan sejenisnya, sedangkan seperti truk dan lain-lain Rp 80. 000," ucapnya. (Dir)

Kepala UPTD pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Nanang Setyo Wahyudi

Kapolsek dan Camat Dukuh Pakis Serta 3 Pilar Silaturahmi Dialog Kamtibmas Bersama Warga Dukuh Kupang

Surabaya, SMN - Bertempat di Warkop Dukuh Kupang Barat XXI Surabaya Kapolsek Dukuh Pakis Polrestabes Surabaya Kompol Mohammad Irfan dan Camat Dukuh Pakis Annita Hapsari Sesoria beserta 3 pilar melaksanakan Silaturahmi Dialog Kamtibmas. Senin (10/4) pukul 21.30 WIB

Kegiatan Silahturahmi dialog kamtibmas ini diikuti oleh Toga, Tomas, Toda, Pengurus RT / RW, Pengurus PKK, serta warga masyarakat sekitarnya.

Pada kegiatan silahturahmi dialog kamtibmas membahas persoalan seputar kamtibmas yang pernah terjadi, sedang berkembang, dan mencegah agar tidak terjadi, semuanya dibahas dengan penuh keterbukaan, keakraban, dan kekeluargaan.

Sesungguhnya silahturahmi dialog kamtibmas ini merupakan upaya Polri hadir lebih dekat dan memberikan edukasi kamtibmas kepada warga masyarakat sehingga dapat menjadi Polisi bagi dirinya sendiri, jelas Kapolsek Dukuh Pakis Kompol Mohammad Irfan.

Dari silaturahmi dialog kamtibmas ini terjadi interaksi yang cukup menarik dengan adanya berbagai usulan dari warga masyarakat perihal Kamtibmas baik kepada Polri maupun 3 pilar agar silaturahmi dialog kamtibmas dapat dilaksanakan sesering mungkin.

"Saya sangat terharu dengan antusias warga masyarakat Dukuh Kupang dalam mengikuti silahturahmi dialog kamtibmas ini," tambah Kapolsek Dukuh Pakis Kompol Mohammad Irfan.

Kompol Mohammad Irfan dan Camat Dukuh Pakis Annita Hapsari beserta 3 pilar melaksanakan silaturahmi bersama warga

Pada kesempatan ini tak lupa disampaikan imbauan Kamtibmas agar semua warga masyarakat peduli terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungannya, saling gotong royong, dan saling mengingatkan. Kegiatan berakhir hingga tengah malam dan diakhiri dengan sesi foto bersama. (Dn)

Kapolsek Dukuhpakis, Ikuti Kegiatan Donor Darah

Surabaya, SMN – Untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah sehabis lebaran. Palang merah indonesia (PMI) bekerja sama dengan Palang Merah Kecamatan Dukuhpakis mengadakan kegiatan bakti sosial berupa donor darah di Halaman Kecamatan Dukuhpakis Surabaya. Selasa (02/5) pukul 09.00 WIB.

Turut hadir dalam kegiatan kali ini Kapolsek Dukuhpakis Kompol Moh Irfan, Danramil 0832/06 Mayor Arh Ahmad Fahrudin, Camat Dukuhpakis Annita Hapsari, Kepala Puskesmas Dukuhpakis, dan jajaran anggota Polsek maupun Koramil.

Kompol Moh Irfan mengatakan ia baru pertama kali mengikuti kegiatan donor darah.

"Walaupun agak sedikit takut jarum tapi tetap semangat untuk membantu sesama untuk mendonorkan darah walaupun setetes darah sangat berarti buat mereka," ungkapnya.

Kapolsek Dukuhpakis Kompol Moh. Irfan Bersama Danramil 0832/06 Karangpilang Mayor Arh Ahmad Fahrudin ilkuti kegiatan donor darah

Menurut Annita kegiatan ini sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat, khususnya seluruh warga di sekitar Kecamatan Dukuhpakis untuk sekiranya bisa membantu meringankan pasokan stok darah yang ada di Surabaya. "Bekerja sama dengan PMI Kota Surabaya dengan menyediakan 75 kantong Darah," ungkapnya melalui WhatsApp.

"Peserta donor darah kali ini sangat didukung oleh Bu Camat dan bisa mendapatkan sembako dengan mengambil undian yang langsung diberikan dengan mengambil nomor," ujar Diah Ketua PMI kecamatan Dukuhpakis pada saat di temui media. (Dn)

Kecamatan Dukuhpakis Menggelar Kegiatan Silaturrahmi Guna Meningkatkan Sinergitas Bersama Tiga Pilar

Surabaya, SMN – Guna menjalin silaturrahmi bersama Stakeholder Kecamatan Dukuhpakis menggelar kegiatan rutin yang bertema "Silaturrahmi Meningkatkan Sinergitas" (SMS).

Bertempat di Halaman Kantor Kecamatan Dukuh Pakis Jl. Mayjen HR. Muhammad no. 167 Surabaya dan dikemas dalam acara Halal Bi Halal Kecamatan Dukuh Pakis bulan syawal 1444 H.

Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Dukuhpakis Annita Hapsari, Danramil 0832/06 Karangpilang Mayor Arh Ahmad Fahrudin, Wakapolsek Dukuh Pakis Iptu Santa Yulia, yang mewakili Kapolsek Forkopimcam Dukuh Pakis, Tiga Pilar Kecamatan Dukuhpakis dan para Ketua LPMK, Perwakilan RT / RW, KSH, toga tomas, instansi terkait, Polisi RW, Polsek Dukuh Pakis, dan para tokoh pemuka Agama.

Pada sambutannya Camat Dukuh Pakis Annita Hapsari menyampaikan acara halal bi halal ini sebagai bentuk silaturahmi saling memaafkan setelah lebaran.

Camat Dukuhpakis Annita Hapsari, Danramil 0832/06 Karangpilang Mayor Arh Ahmad Fahrudin, Wakapolsek Dukuh Pakis Iptu Santa Yulia

"Juga disampaikan terimakasih kepada Polsek Dukuh Pakis yang telah memperkenalkan para Polisi RW nya dihadapan para undangan yang hadir," ungkap Annita

Atas apresiasi dari Camat Dukuhpakis, Wakapolsek Dukuh Pakis Iptu Santa Yulia yang mewakili Kapolsek menyampaikan terimakasih berkenaan perkenalan Polisi RW. Setelah acara selesai tamu undangan langsung bersalaman dan dilanjutkan menikmati hidangan dari produk UMKM binaan Kecamatan Dukuhpakis yang telah tersedia sambil menikmati musik elekton. (Dn)

Peringatan Hardiknas, Guru di Kota Batu Terima Satyalancana Karya Satya

Pj. Walikota Batu saat memberikan penghargaan di Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani

Malang, SMN - Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2023, sebanyak 88 guru di lingkungan Pemerintah Kota Batu menerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia Satyalancana Karya Satya. Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia ini diserahkan langsung oleh Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Pawai, di Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani, Selasa (02/05).

Satyalancana Karya Satya adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya.

"Penghargaan ini adalah wujud kesetiaan pemerintah kepada ASN yang telah mengabdi kepada masyarakat," kata Pj. Wali Kota.

Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional kali ini, penghargaan diberikan kepada ASN dalam bidang pendidikan. Aries berharap, ASN di Kota Batu dapat menunaikan tugas dan tanggungjawab dengan baik dan penuh tanggungjawab.

"Tugas ASN tentunya tidak mudah, masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Mari kita sama-sama memberikan pelayanan terbaik di bidang pendidikan," pungkas Pj. Wali Kota. (Henny)

Sebabkan Kerugian 1 Miliar, 4 Orang Pemadam Kebakaran Malang Plaza Dilarikan ke RS

Kondisi Malang Plaza setelah kebakaran

Malang, SMN - Kebakaran hebat yang melanda Malang Plaza pada Selasa dini hari (2/5/2023) membuat para pemilik usaha di dalamnya mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Pusat perbelanjaan ini dikenal luas sebagai salah satu sentra handphone di Kota Malang, dimana Menurut laporan yang diterima media ini, sebagian besar toko dan fasilitas di lantai dasar, serta lantai dua dan 3 mengalami kerusakan parah akibat terbakar dan terendam air dari proses pemadaman.

Sejumlah toko besar mengalami kerusakan parah dan bahkan luluh lantak. Kondisi toko-toko kecil dan kios di lantai dasar tak kalah mengenaskan. Banyak produk jualan dan peralatan yang hancur dilalap si jago merah

Yani, salah satu pemilik toko handphone di Malang Plaza, mengaku total kerugian yang dialaminya mencapai Rp1 milliar.

Dirinya menjelaskan bahwa tokonya menjual beraneka merek handphone, casing, dan aksesoris yang semuanya baru.

Saya terkejut mengetahui kejadian ini. Karena kemarin sewaktu menutup toko tidak ada kejadian yang janggal," jelas Yani yang membuka toko di Malang Plaza sejak 2004 itu

Sementara itu, Walikota Malang, Sutiaji saat di temui menyampaikan, jika ada satu kendaraan pemadam kebakaran terjebak di area lokasi kebakaran.

"Bahkan, ada sejumlah petugas yang mengalami sesak nafas dan harus dilarikan ke rumah sakit," tambah Sutiaji

Iya 4 orang memang dirawat, 3 orang petugas PMK dan 1 orang relawan yang sesak nafas dan dilarikan ke rumah sakit, tetapi semuanya sudah terkondisikan dan membaik, jelas Sutiaji

Perlu dikatahui, Malang Plaza merupakan tempat perbelanjaan tertua di Malang yang berdiri tahun 80'an.

Dahulu Plaza Malang terkenal sebagai centra fashion dan pusat perbelanjaan utama di pusat Kota dan Seiring berjalannya waktu kini Malang Plaza lebih didominasi oleh kios kios handphone dan perangkat elektronik.

Walau demikian, tidak semua yang berubah, di mall itu masih ada kios yang menjual baju dan peralatan rumah tangga. (Henny)

DPRD Kab. Jepara Sahkan Perda RTRW

Jepara, SMN – Setelah melalui pembahasan yang panjang, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara tahun 2023 – 2043 akhirnya ditetapkan. Penetapan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Jepara di Gedung Dewan, Kamis (4/5/2023).

Pengesahan Perda tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Haizul Ma'arif didampingi 3 orang wakil krtua Junarso, Nuruddin Amin dan Pratikno, Kamis (4/5/2023). Sementara dari jajaran eksekutif nampak hadir Pj Bupati Edy Supriyanta didampingi Sekda Jepara Edy Sujatmiko dan para kepala Organiasasi Perangkat Daerah.

Ketua DPRD Haizul Ma'arif Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2043 SAH

Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD, walaupun prosesnya cukup panjang namun Perda RTRW akhirnya bisa ditetapkan.

"Dengan demikian dapat menjadi pegangan eksekutif dalam memberikan kepastian hukum terhadap pengembangan dan penataan suatu wilayah, diantaranya untuk kepentingan investasi," ujar Edy Supriyanta.

Diperoleh keterangan, terkait dengan keberadaan tambak udang di Karimunjawa dalam perarturan peralihan Perda RT RW diatur tentang mekanisme penyelesaiannya. Bagi yang telah memiliki ijin yang benar dan lengkap akan diberikan waktu 2 tahun. Sedangkan yang baru saja menebar benih tetapi ijin tidak lengkap akan diberikan waktu 3 bulan hingga penen untuk menutup usahanya. Sementara yang baru tidak lmemiliki ijin lengkap tidak boleh untuk beroperasi. (Petrus)

Pj. Bupati Jepara Pimpin Langsung Larung Kepala Kerbau

Pj. Bupati Jepara Edy Supriyanta didampingi Muspida saat melepas kepala kerbau di perairan Pulau Panjang, Jepara

Jepara, SMN - Tradisi lomban atau larung kepala kerbau di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berlangsung meriah, dimulai pukul 07.15 dari TPI Ujungbatu Sabtu (29/4/2023).

Diikuti ratusan perahu nelayan dan ribuan pengunjung di beberapa titik seperti di pantai Kartini, pantai Ujungbatu, pantai Bandengan, pantai teluk awur.

Pelarungan sesaji di perairan Jepara dipimpin langsung Pj. Bupati Jepara Edy Supriyanta dan didampingi unsur muspida.

Prosesi tersebut, dibuka dengan tari Sernemi yang merupakan tarian tradisional khas masyarakat nelayan.

Sesaji yang berisi kepala kerbau, ingkung (ayam utuh), jajanan pasar, serta kupat (ketupat), dan lepat sebelum dilarung diletakkan di dalam miniatur kapal.

Saat sesaji dilarung di perairan sekitar Pulau Panjang Jepara, sejumlah kapal nelayan berebut mendekat, sehingga sejumlah kapal nelayan hampir bersenggolan dengan kapal lain.

Setelah menempuh perjalanan sekitar 40 menit, kepala kerbau yang sudah tertata rapi di dalam replika kapal kemudian dilarung ke tengah laut dilepas langsung oleh Pj. Bupati Jepara Edy Supriyanta. Kemudian, para nelayan menceburkan diri ke laut untuk berebut sesaji dan mencari berkah.

"Alhamdulillah, pelaksanaan larungan kepala kerbau hari ini (29/4) berjalan lancar. Sedikitnya 200 perahu nelayan ikut mengawal pelarungan," kata Penjabat Bupati Jepara Edi Supriyanta.

Menurut Edy, kita bangga Tradisi Lomban masyarakat nelayan sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) ini harus terus dilestarikan dan dikembangkan merupakan kekayaan seni budaya di Jepara.

Berdasarkan cerita, kata Edy, sejarah tradisi larungan bermula dari kisah penyelamatan dua pejabat Kadipaten Jepara yang berlayar ke Karimunjawa pada tahun 1855.

Saat itu, imbuh Edy Supriyanta, perahu yang mereka tumpangi terombang-ambing karena badai. Beruntung, Ki Ronggo Mulyo dan Cik Lanang mengetahui peristiwa tersebut dan keduanya segera memberikan pertolongan.

Dari peristiwa itu, kemudian diselenggarakan syukuran dengan melarung sesajen ke laut dan menjadi acara tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat dengan nama Lomban Kupatan. Selain itu, Lomban Kupatan ini juga memberikan manfaat banyak pihak, karena menjadi salah satu destinasi wisata untuk agenda tahunan.

Sebelum digelar pesta lomban, juga dilakukan ziarah ke makam Cik Lanang di pulau Kelor (Pantai Kartini) serta ke makam Mbah Ronggo, dilanjutkan dengan pelarungan sesaji (kepala kerbau) sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan serta harapan akan rezeki yang baik di masa datang.

Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Jepara Sudiyatno berharap para nelayan dianugerahi hasil laut yang melimpah, termasuk senantiasa diberikan keselamatan saat beraktivitas di laut.

Di tempat yang sama Sekda Jepara Edy Sujatmiko yang ikut serta menghadiri prosesi lomban berpesan, masyarakat dan pelaku wisata jepara diminta saling mengingatkan agar kenyamanan dan keselamatan pengunjung terjaga dengan baik.

Secara khusus, kesiapan menerima kunjungan wisatawan Pesta Lomban di Kabupaten Jepara, disampaikan kepada penyedia makanan, minuman, dan jasa wisata agar tidak menaikkan harga jualannya.

"Dapat menimbulkan kesan yang kurang baik, termasuk juga masyarakat dan wisatawan menjaga kebersihan kota kita sebagai penerima Adipura Kencana," harap Edy Sujatmiko.

Menurut Edy Sujatmiko, larung kepala kerbau dianggap sebagai sedekah laut dan sedekah kepada sang pencipta.

Selain itu kegiatan ini juga dapat menimbulkan rasa syukur yang membuat kita selalu mengingat Tuhan.

"Jangan dimaknai bahwa ini merupakan kegiatan yang musyrik tapi ini bersyukur kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga tidak dibuang (sesaji) itu pun dimakan oleh masyarakat nelayan," pungkas Edy. (Petrus)

Pelantikan Senat Taruna Tk. IV/Sermatutar Akademi Militer

Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Legowo W.R. Jatmiko, melantik Senat Taruna Tk. IV/Sermatutar Akademi Militer TP. 2022/2023, di Gedung Lily Rochli Akmil

Magelang, SMN - Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Legowo W.R. Jatmiko, melantik Senat Taruna Tk. IV/Sermatutar Akademi Militer TP. 2022/2023, bertempat di Gedung Lily Rochli Akmil. Kamis (04/05/2023).

Dalam kata pengantar tertulisnya Gubernur Akademi Militer menyampaikan bahwa, Organisasi Senat Taruna tingkat IV Akademi Militer dibentuk sebagai wadah Perwakilan Taruna tingkat IV untuk mempermudah koordinasi maupun sebagai media kontrol rantai komando guna melatih tanggung jawab yang diberikan oleh lembaga Akademi Militer.

Sebagai badan perwakilan Taruna tingkat IV, senat mempunyai tugas untuk mewakili Taruna tingkat IV Akademi Militer pada tingkat lembaga Akademi Militer, mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan Taruna tingkat IV dan memberikan pendapat, usul, serta saran kepada pimpinan lembaga secara hierarki, terutama yang berhubungan dengan fungsi senat.

Selanjutnya, beliau berpesan kepada pengurus senat untuk bekerja secara optimal, ikut berperan serta secara aktif membantu pengasuh dalam mengendalikan dan menciptakan suasana belajar dan berlatih yang tinggal dua bulan lagi, sebelum melaksanakan Praspa.

"Tinggal selangkah lagi kalian akan dilantik menjadi Perwira. Jauhkan diri dari tindakan penyimpangan untuk meminimalisir pelanggaran Perduptar maupun Perkhustar," lanjutnya.

Akhirnya Gubernur Akademi Militer selaku pimpinan lembaga maupun atas nama Civitas Akademika Akademi Militer mengucapkan selamat kepada pengurus Senat Taruna tingkat IV Akademi Militer TP 2022/20023.

"Bekerjalah dengan penuh keikhlasan, karena dengan keikhlasan kita tetap semangat, baik diapresiasi orang lain ataupun tanpa apresiasi," tutupnya. (Suroto Anto Saputro)

Masyarakat Jepara Siap Menerima Wisatawan dengan Ramah

Sekda Jepara Edy Sujatmiko saat membuka pentas wayang kulit di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ujungbatu, Jepara, pada Jumat (28/4/2023) malam

Jepara, SMN – Menyambut puncak tradisi Pesta Lomban yang digelar Sabtu (29/4/2023) ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko, menyebut bahwa masyarakat dan pelaku wisata di Jepara, siap menyambut wisatawan dengan ramah.

Masyarakat dan pelaku wisata Jepara diminta saling mengingatkan agar kenyamanan dan keselamatan pengunjung terjaga dengan baik.

Pesan itu dia katakan saat membuka pentas wayang kulit di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ujungbatu, Jepara, pada Jumat (28/4/2023) malam.

"Saya minta masyarakat siap menerima wisatawan dengan ramah. Tapi saya mohon, masyarakat dan nelayan bisa saling ingatkan, jangan sampai membiarkan wisatawan euforia, lalu lupa faktor keselamatan. Misalnya wisata naik perahu tanpa pelampung, naik di atap perahu, dan sebagainya. Harus saling mengingatkan," kata Edy Sujatmiko.

Secara khusus, kesiapan menerima kunjungan wisatawan Pesta Lomban di kabupaten jepara, disampaikan kepada penyedia makanan, minuman, dan jasa wisata.

"Jangan sampai sudah tahu kondisi ramai, malah mremo. Aja nengkik. Jualan yang wajar saja. Misalnya Pindang Serani biasa dijual Rp170 ribu per kilogram, jangan dinaikkan jadi Rp300 ribu," tandasnya.

Mremo atau nengkik dalam dialek masyarakat Jepara, adalah kelakuan pedagang yang getok harga mahal. Sedangkan Pindang Serani adalah nama jenis masakan ikan khas Jepara.

"Sekali ada kabar (penjual) nengkik, akan memperburuk citra wisata Jepara," kata Sekda Edy sujatmiko sesaat sebelum pentas wayang dengan Lakon Dewa Ruci oleh Ki Dalang Warsito.

Pentas wayang ini merupakan bagian dari rangkaian Pesta Lomban di jepara.

Dari tempat yang sama, Sabtu pagi ini diberangkatkan rombongan larung kepala kerbau sedekah laut yang akan dilepas di perairan Jepara. Tradisi larungan kepala kerbau merupakan rangkaian dari tradisi pesta lomban yang diikuti ribuan warga Jepara sebagai bentuk syukur atas rezeki yang dilimpiahkan kepada mereka.

"Masyarakat Jepara itu belum marem (puas) kalau belum Pesta Lomban. Tukang (tukang kayu, tukang amplas, pekerja mebel, ukir dsb.,) saja belum plong, tidak mau bekerja kalau belum Pesta Lomban," tandas dia.

Karena itulah, larungan sebagai puncak tradisi lomban, diramaikan ratusan perahu dan kapal nelayan Jepara.

"Kemudian pesta lomban dilanjutkan Festival Kupat Lepet di Pantai Kartini," demikian Edy Sujatmiko menyebut rangkaian lanjutan tradisi Pesta Lomban yang masih akan digelar Sabtu ini. (Petrus)

Polisi Berhasil Ungkap Kasus Pencabulan Anak di Batang

Polda Jateng Bersama Polres Batang Gelar Konferensi Pers Kasus Pencabulan Anak di Lobi Mapolres Batang

Batang, SMN - Polres Batang Polda Jateng berhasil mengungkap lima kasus tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur dalam waktu sebulan. Salah satunya dilakukan oleh diduga oknum seorang guru ngaji yang melakukan sodomi pada belasan muridnya.

Kapolres Batang, AKBP Saufi Salamun mengungkapkan bahwa lima kasus tersebut terjadi selama April hingga Mei 2023. Tersangka dari kelima kasus tersebut memiliki berbagai profesi, termasuk oknum seorang guru ngaji yang melakukan pelecehan seksual berupa sodomi terhadap anak-anak ngajinya.

Rincian kasus tersebut adalah sebagai berikut: pertama, seorang guru ngaji asal Desa Kedungmalang, Kecamatan Wonotunggal, TS (43) yang mensodomi 13 muridnya sejak 2017.

Kedua, seorang tukang cukur bernama T alias Muji (52) yang mencabuli anak perempuan berkebutuhan khusus berusia 12 tahun.

Ketiga, kasus incest persetubuhan anak di bawah umur antara kakak dengan adik satu ayah tapi beda ibu yang berakhir dengan pemerasan.

Keempat, C (37) yang mencabuli anak perempuan berusia 7 tahun. Kelima, adalah pencabulan oleh pelaku berinisial T (21) pada anak punk yang berusia 15 tahun.

"Tersangka yang baru tertangkap minggu lalu, awalnya pemerasan. Saat saudara tiri memeras adik tiri perempuannya, tersangka mengancam akan menyebarkan video atau foto asusila. Setelah kami tangkap, prosesnya berkembang menjadi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak," ungkap Kapolres didampingi Forkopimda saat konferensi pers di Lobi Mapolres Batang, Kamis (4/5/2023).

Untuk menangani kasus pencabulan tersebut, pihak kepolisian telah menerapkan UU Perlindungan Perempuan dan Anak serta UU Tindak Pidana Cabul. Pihak kepolisian juga mengundang forkompimda dan instansi terkait dalam konferensi pers tersebut.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Batang, Ari Yudianto menyatakan keprihatinannya atas maraknya kasus pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Batang yang bahkan sudah menjadi perhatian nasional. Ia menyatakan sudah membentuk tim gabungan untuk penanganan kekerasan seksual dan akan menggelar rapat koordinasi terkait hal tersebut.

Ari Yudianto mengharapkan agar pelecehan seksual pada anak tidak terjadi lagi di Kabupaten Batang. Rapat koordinasi tersebut akan menghasilkan rekomendasi dan program kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

"Kita harus tegas, karena itu sudah menjadi sebuah musibah kita bersama, hal yang tidak kita inginkan. Karena kekerasan ini timbul justru dari orang yang harus melindungi ataupun dari orang dekat sendiri," ucapnya.

Adapun pasal yang disangkakan pada tersangka yakni Pasal 82 UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 dan atau pasal 81 UU RI

tentang perubahan ke dua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. (Paimin Nugroho)

3 Raperda Disahkan Jadi Perda Kota Pekalongan

Kota Pekalongan, SMN – Akhirnya Raperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan dilakukan antara jajaran eksekutif dari Pemerintah Kota Pekalongan dan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna dengan Acara Pengambilan Keputusan DPRD Kota Pekalongan atas 2 Raperda Kota Pekalongan dan 1 Raperda prakarsa DPRD Kota Pekalongan, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Selasa sore (2/5/2023).

Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid saat membacakan pendapat akhirnya mengaku bersyukur atas disetujuinya tiga raperda itu.

Disampaikan Aaf, bahwa Raperda pertama tentang Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penandatanganan Raperda menjadi Perda

Pengaturan pajak dan retribusi dalam raperda yang baru mengatur mengenai restrukturisasi pajak, kewenangan pemungutan opsen, dan penyerdehanaan retribusi.

Ditetapkannya raperda ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah dalam optimalisasi tata kelola keuangan serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan pajak dan retribusi bagi masyarakat.

Lanjutnya, Raperda kedua tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, dimana raperda ini dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola pasar rakyat yang baik dan profesional guna mewujudkan keberadaan pasar rakyat yang tertib, teratur, bersih, aman, nyaman, sehat, dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai ketentuan SNI Pasar Rakyat.

Selain itu, pengaturan mengenai pengelolaan pasar diharapkan mampu menciptakan, memperluas, dan meratakan kesempatan kerja di bidang perdagangan.

Sementara, raperda ketiga tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan raperda atas prakarsa DPRD Kota Pekalongan.

Pihaknya menegaskan, disepakatinya 3 raperda ini menjadi perda atas dukungan kolaborasi dan komunikasi yang selama ini terjalin dengan sangat baik antara eksekutif dan legislatif di Kota Pekalongan. Sehingga, dalam prosesnya berjalan lancar tanpa ada masalah apapun.

"Harapan kami, 3 raperda ini dilakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang ada. PR Kota Pekalongan masih banyak untuk menyusun raperda- raperda lain. Mudah-mudahan di Tahun 2023 ini 3 raperda yang sudah disetujui bersama ini bisa berimbas baik ke masyarakat Kota Pekalongan dan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena salah satu raperda di dalamnya ada penyesuaian harga," harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir mengungkapkan bahwa, dari 3 raperda yang ditetapkan ini, 2 raperda merupakan usulan Pemkot Pekalongan dan 1 raperda prakarsa dari DPRD Kota Pekalongan.

"Atas pengambilan keputusan DPRD Kota Pekalongan atas 3 raperda ini nantinya bisa ditetapkan menjadi perda Kota Pekalongan oleh Walikota Pekalongan setelah dikonsultasikan oleh Gubernur Jawa Tengah dan bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni 2 Mei 2023," terang Azmi.

Ditambahkan Ketua Pansus III DPRD Kota Pekalongan, Makmur Mustofa, bahwa untuk perda prakarsa DPRD Kota Pekalongan yakni tentang CSR ini merubah Perda yang ada sebelumnya yakni Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang belum berjalan efektif karena belum berjalan efektif karena belum adanya peraturan (Perwal) yang menjadi dasar teknis perda tersebut. (Subekhi)

Hari Jadi ke-57, Pemkab Batang Gelar Wayang Kulit

Forkopimda Batang gelar wayang kulit dengan menampilkan dalang Ki Juoro Banyu Kusumo di Pendopo Kabupaten Batang

Batang, SMN - Masih dalam rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kabupaten Batang Ke-57, bertempat di Pendopo Kabupaten Batang telah diadakan Pagelaran wayang kulit dengan menampilkan dalang Ki Juoro Banyu Kusumo dari Kecamatan Subah. Kamis (4/5/23) malam, pagelaran wayang kulit dimulai pukul 21.00 WIB dengan judul "Wahyu Kamulyan Jati".

Sebelum acara dimulai PJ Bupati Batang Lani Dwi Rezeki dalam sambutan menyampaikan, Pagelaran wayang kulit malam ini adalah untuk memperingati hari jadi kabupaten Batang ke 57.

Rangkaian kegiatan sudah kita ikuti dari bulan ramadhan sampai sekarang, pada malam hari ini kita saksikan pagelaran wayang kulit.

Pada malam ini saya ucapkan terimakasih kepada segenap panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan malam hari ini, untuk menghibur warga Kabupaten Batang, terimakasih juga saya ucapkan kepada warga yang sudah datang untuk melihat pagelaran wayang kulit yang di selenggarakan Pemkab. Batang, ucapnya.

Pagelaran wayang kulit ini adalah kegiatan yang diselenggarakan secara rutin tiap tahun dalam rangka nguri - nguri budaya Jawa karena di era milenial saat ini kalau kita tidak menguri - nguri budaya kita sendiri nanti generasi muda penerus akan lupa dengan tradisi yang kita punya dan akan kalah dengan tradisi yang masuk dari luar, sehingga anak - anak kita beranggapan tradisi luar itu lebih bagus dari pada tradisi budaya kita sendiri.

Untuk itu saya ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Pepadi, pengrawit dan yang lainya yang masih mempunyai semangat tinggi untuk menguri nguri budaya kita. Jangan sampai budaya kita hilang karena tergerus arus globalisasi yang akhirnya generasi muda kita lupa pada budaya asli Indonesia khususnya budaya Jawa, tungkas PJ Bupati Batang.

Selanjutnya PJ Bupati Batang didampingi Forkopimda menyerahkan wayang kepada dalang Ki Juoro Banyu Kusumo sebagai simbol kalau pagelaran boleh dimulai. (Subheki)

Surat Kabar Umum
Suara Media Nasional
Bersama Membangun Daerah
Edisi 540/ XV / 8 - 21 Mei 2023

Wabup Sukabumi Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tentang Laporan Masa Sidang ke-1 dan Penyampaian Nota Pengantar Raperda

Sukabumi, SMN - Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian laporan masa sidang ke-1 tahun ke-4 masing-masing alat kelengkapan DPRD, Penyampaian nota pengantar 2 Raperda usul prakarsa DPRD tentang Raperda pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan serta Raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Rapat diselenggarakan di Aula Utama DPRD Kab Sukabumi, Jumat (5/5/23).

Rapat Paripurna DPRD Sukabumi tentang Laporan Masa Sidang ke-1 dan Penyampaian Nota Pengantar Raperda

Ketua DPRD Kab. Sukabumi Yudha Sukmagara mengatakan, dalam bahasan rapat paripurna DPRD ada beberapa raperda yang di prioritaskan karena ada beberapa usulan dari anggota, selain itu dibahas juga Raperda tentang retribusi dan pajak.

"Ditahun 2023 ini Raperda-Raperda tersebut akan di godok betul oleh DPRD Kab Sukabumi untuk menghasilkan Raperda yang berkualitas. Sehingga outcome nya bisa menjadi daya guna bagi kepentingan masyarakat," ujarnya.

Dibahas juga Raperda APBD TA 2024 dan perubahan APBD 2023, diketahui diminggu yang akan datang anggota DPRD sudah masuk masa reses yang merupakan amanat tata tertib di DPRD yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Forkopimda, Forkopimcam, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. (roby)

Yudha Sukmagara Ajak Pengunjuk Rasa Duduk Bersama

Ratusan massa tergabung dalam Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP) berunjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (4/05/2023)

Sukabumi, SMN - Ratusan massa tergabung dalam Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP) berunjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (4/05/2023). Mereka mendesak wakil rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Sebab di dua instansi tersebut diduga ada oknum-oknum ASN yang bermain proyek.

Aspirasi yang mereka sampaikan didengarkan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara, Ketua Komisi IV Hera Iskandar, dan anggota Fraksi PKB Dadan Hasanudin.

Massa akhirnya diajak masuk ke ruangan Badan Musyawarah (Bamus) untuk beraudiensi dengan perwakilan dinas dan anggota DPRD.

"Bapak-bapak wakil rakyat dimohon mengawasi oknum ASN di dua organisasi perangkat daerah baik Kepala Bidang maupun level paling bawah. Di lapangan kami menemukan banyak oknum diduga kuat suka memainkan mata anggaran di APBD, mereka terindikasi bermain proyek," tuding koordinator aksi, Friady Mahyuzar.

Dia meminta kepala perangkat daerah yang disebutkan agar menindak tegas anak buahnya yang terindikasi bermain proyek. Namun, Friady merasa kecewa lantaran kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata tidak hadir pada sesi audiensi.

"Tidak etislah masa kepala dinas tidak hadir, hanya mendelegasikan kepada anak buahnya. Kita hargai upaya DPRD yang akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perangkat daerah terkait besok. Tentu saya akan hadir karena diundang. Kita buka secara terang benderang semua kasus yang ada di dua perangkat daerah tersebut," ungkapnya.

Friady mengancam akan membuat laporan ke Kejagung RI terkait kasus-kasus di Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata apabila Kepala Dinasnya tidak hadir dalam RDP yang sudah diagendakan oleh DPRD.

"Ini langkah terakhir kami. Pembangunan di Kabupaten Sukabumi itu harus sesuai harapan masyarakat, bukan kemauan atau selera para pejabat tertentu," tegasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, menyatakan, audiensi bersama massa FPP belum menghasilkan sebuah solusi. Bahkan, mereka kecewa karena kepala dinas yang bersangkutan tidak hadir.

"Jadi audiensi hari ini kita tunda. Kalau dilanjutkan khawatir terjadi perdebatan yang kurang elok, harusnya kepala dinas terkait yang menjawab keinginan massa FPP ini. Kita sepakati besok ada RDP. Anggota DPRD semua hadir, karena kami ingin tahu isu apa yang akan diangkat FPP nanti," tandasnya. (roby)

Menjadi Mentor PKN Tingkat II, Sekda Tekankan Proyek Perubahan Harus Mendukung Visi Misi Kabupaten Sukabumi

Sekda saat didaulat sebagai mentor kegiatan Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2023 bertempat di BPSDM Provinsi Jawa Barat, Cimahi, Jumat 5 Mei 2023

Sukabumi, SMN - Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman menyampaikan bahwa Setiap peserta PKN diharuskan membuat makalah atau inovasi perubahan yang ada di dinas instansinya dan harus bisa di implementasikan kepada masyarakat dan pemerintah sebagai salah satu syarat yang harus dibuat oleh para peserta diklat.

Hal itu disampaikan Sekda usai didaulat sebagai mentor pada kegiatan Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2023 bertempat di BPSDM Provinsi Jawa Barat, Cimahi, Jumat 5 Mei 2023.

Sekda juga menekankan peserta PKN harusmampu mengimplementasikan proyek perubahan di tempat kerjanya masing-masing untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi

"Berdasarkan penilaian terhadap inovasi yang dibuatkan mudah-mudahan pelaksanaannya nanti jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang bisa dilaksanakan untuk menunjang terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin" terangnya

Dalam kesempatan itu, Sekda terus memberi semangat kepada 4 orang pejabat eselon II Pemkab Sukabumi yang mengikuti Diklat Kepemimpinan.

Sebagai informasi, pejabat yang mengikuti PKN Tingkat II Angkatan IV Tahun 2023 yakni Nunung Nurhayati, S.Sos., KP., M.Si Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi., dr. Gatot Sugiharto, Sp.B., MARS. Direktur UPTD RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi., Sri Hastuty Harahap, SP., MSE., MA. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi., H. Amir Hamzah, S.Sos., M.Si. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sukabumi. (roby)

Urusan Status Wakaf Clear, Sekda Kota Bogor Tinjau Lapangan Empang untuk Persiapan Bangun Arabian Town

Kota Bogor, SMN - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah memimpin peninjauan ke lapangan Empang, Jalan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor yang akan segera dibangun kawasan Arabian Town.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah (No. 6 dari kiri) saat memimpin peninjauan ke lapangan Empang

Pada peninjauan ke lapangan Empang ini, sekda turut mengajak beberapa OPD terkait dan PT Tirta Investama Danone dan PT Aneka, Kamis (04/05/2023).

"Rencana pengembangan kawasan Arabian Town ini sudah dari beberapa tahun sebelumnya, namun belum bisa terlaksana karena Nazir belum terbentuk. Alhamdulillah sudah terbentuk Nazirnya dan dari Badan Wakaf Indonesia sudah keluar SK Nazirnya,ini menjadi jaminan kalau Nazir ini sah," ujar Syarifah.

Syarifah mengatakan, Nazir yang sah ini penting mengingat lapangan Empang ini merupakan tanah wakaf. Nazir ini merupakan orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

"Pihak Nazir sudah bersurat ke Wali Kota Bogor agar Pemerintah Kota Bogor bisa memfasilitasi pengembangan kawasan ini. Pemkot Bogor pun membantu memfasilitasi dengan menggandeng investor atau mencari CSR dari perusahaan serta melibatkan BJB, karena ini tanah wakaf tidak bisa pakai APBD," terangnya.

Pengembangan kawasan bertema Arabian Town ini akan menjadi pusat pengembangan baru di Kota Bogor selain Suryakencana yang tentunya memerlukan pendanaan tidak sedikit. Apalagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor juga sudah membuat master plan untuk kawasan Arabian ini.

"Desain kawasan ini akan dibahas bersama. Dari Pemkot memang ingin menjadikan kawasan ini Arabian Town dengan ornamen lampu-lampu khas Arabian, kulinernya juga khas Arabian," jelasnya.

Sekda menilai, kawasan Empang ini merupakan kawasan yang memiliki potensi besar apalagi ketika ada acara keagamaan atau hari besar Islam yang mana bisa mendatangkan tamu sangat banyak.

Sehingga akan lebih baik jika memiliki fasilitas yang bagus dan rapi. Apalagi terkhusus lapangan ini, wasiat para wakif yang mewakafkan tanah ini harus bisa bermanfaat untuk ekonomi umat, terutama untuk Masjid Agung At-Thohiriyyah.

"Jadi hasil dari ini bisa untuk Masjid, untuk UMKM alias untuk umat. Sementara sekarang belum ada penghasilan apapun. Kalau kami, Pemkot Bogor yang terpenting kawasan ini tumbuh, karena tugas kami kan mensejahterakan masyarakat dengan memfasilitasi seperti ini, menghubungkan Nazir dengan perusahaan yang mau memberikan CSR," katanya. (dk/kfb)

Terhadap LKPJ Wali Kota Tahun 2022, DPRD Depok Sampaikan Sejumlah Rekomendasi

Depok, SMN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Depok Tahun 2022, kemarin (28/04/2023). Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Depok T.M Yusufsyah Putra.

Turut hadir Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, Wakil Ketua DPRD Depok Yeti Wulandari, H. Tajudin Tabri, para anggota DPRD Depok, Sekretaris daerah, dan kepala Perangkat Daerah (PD) di Pemerintah Kota Depok.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Pansus LKPJ, Rienova Serry Donie menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran tahun berjalan serta tahun berikutnya. Lalu, dalam penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Kebijakan Strategis Kepala Daerah.

"Untuk rekomendasi umum, Pemkot Depok dapat mempercepat penangulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM dengan memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat miskin dan pembangunan inklusif," tutur Reinova saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Depok.

"Lalu, memperbaiki tata kelola keuangan dan aset daerah guna optimalisasi peningkatan pajak daerah," ujarnya.

Selanjutnya, rekomendasi yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk pendidikan, diperlukan pembangunan sekolah baru di beberapa wilayah, khususnya jenjang SMP.

Untuk kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Depok diminta lebih aktif membina rumah sakit yang ada, terutama rumah sakit swasta agar lebih transparan dalam melayani masyarakat. Kemudian, untuk pekerjaan umum dan tata ruang, pembangunan trotoar harus ditingkatkan guna melindungi pejalan kaki, karena sudah terdapat beberapa yang rusak dan alih fungsi.

Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (tengah) menerima Rekomendasi LKPJ Wali Kota Depok Tahun 2022 dari Ketua DPRD Depok, T.M. Yusufsyah Putra (kanan) didampingi Wakil Ketua DPRD, Yeti Wulandari (kiri) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Depok, Jumat (28/04/2023)

Reinova melanjutkan, untuk rekomendasi urusan wajib yang berkaitan dengan urusan dasar seperti tenaga kerja, diperlukan kebijakan singkronisasi antara dunia pendidikan, pelatihan dan tenaga kerja.

Terakhir, dalam urusan pariwisata, diperlukan adanya program pengembangan ekonomi kreatif. Melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam mendukung perkembangan pariwisata.

"Semoga rekomendasi yang disampaikan menjadi bagian tak terpisahkan sebagai dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan kebijakan strategis Wali Kota," tutup Reinova. (dk)

Kaum Akademik Sangat Mendukung Agar RUU Perampasan Aset Segera Diundangkan

Jakarta, SMN - Secara prinsip kami, kaum akademik sangat mendukung penuh agar RUU Perampasan Aset ini segera dilakukan pembahasan dan menjadi prioritas untuk diundangkan, dan memang sudah masuk kedalam prolegnas 2023, tegas Hendri Jayadi Pandingan dalam pandangannya mengenai pengesahan UU Perampasan Aset mutlak untuk dipercepat Rabu (3/5/23).

Dari pengamatan Hendri memaparkan, kaitan dengan harta harta atau aset aset yang diperoleh dari hasil kejahatan, bukan hanya terbatas dari hasil tindak pidana korupsi tapi tindak pidana lain seperti narkotika atau human trafficking dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU.

"Karena setelah barang tersebut disita dari proses penyidikan sampai dengan putusan hukum tidak terdapat kejelasan terhadap aset aset hasil kejahatan tersebut. Karena aset aset tersebut hanya disita dan kemudian dilelang atau dijual yang mana hasilnya masuk kedalam kas Negara," tandasnya.

Ditegaskan Praktisi Hukum ini bahwa Kejaksaan dan KPK memiliki Direktur yang khusus untuk melakukan penyitaan dan eksekusi terhadap aset aset kejahatan tersebut. Tetapi hal tersebut dilakukan secara sektoral tidak menyeluruh. Maka kata Hendri sangat diperlukan lembaga khusus yang bukan hanya melelang aset namun juga dapat mengelola aset hasil kejahatan yang dimana hasilnya akan digunakan untuk merecovery kerugian negara dan bisa menjadi another income dalam PNBP.

"Dan saya sangat senang apa yang menjadi ide ide saya tadi sudah diakomodir didalam RUU ini, hal mana diatur didalam draf RUU BAB VI tentang Badan Pengelola Aset dari pasal 36 sd pasal 61. Sehingga aset rampasan tersebut bukan hanya dijual atau dilelang tetapi ada konsep pengelolaan disana yang mana hasilnya digunakan sebagai pendapatan Negara," ujar Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Hendri Jayadi Pandingan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

"Jadi sekali lagi kami sebagai akademisi, sangat mendukung agar RUU Perampasan Aset segera diundangkan," pungkasnya. (lian)

Menghadapi Bonus Demografi di GKJ Jeruklegi dan GKJ Siapkan Generasi Unggul

Cilacap, SMN - Bertempat di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Jeruklegi dan GKJ Bangkal Cilacap Jawa Tengah, kembali digelar Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan mengangkat tema "Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Minggu dan Keluarga Muda untuk Mempersiapkan Generasi Unggul yang Siap Menghadapi Bonus Demografi di GKJ Jeruklegi dan GKJ Bangkal, Cilacap, Jawa Tengah" di mana kegiatan ini dilaksanakan tanggal 15-16 April 2023.

Foto persama Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Minggu dan Keluarga Muda untuk Mempersiapkan Generasi Unggul yang Siap Menghadapi Bonus Demografi di GKJ Jeruklegi dan GKJ Bangkal, Cilacap, Jawa Tengah

Adapun kegiatan ini dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen PPs UKI berkolaborasi dengan dua dosen dari Prodi Doktor Pendidikan Agama Kristen dan Prodi Sarjana Pendidikan Agama Kristen, di mana semua Tim PkM berjumlah tujuh orang, yakni: Desi Sianipar, M.Th., D.Th., Dr. A Dan Kia, M.Th., Wellem Sairwona, M.Th., Endang Kristiani Hulu, S.Th, Nadia Eko Agustia, S.Th., Ade Epatri Nenomataus, S.Pd., dan Udin Firman Hidayat, S.Si.Teol. Kegiatan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) diketuai Desi Sianipar, M.Th, D.Th dosen Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen PPs UKI.

"Kegiatan ini ditujukan kepada para Guru Sekolah Minggu di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Jeruklegi dan kepada para keluarga muda di GKJ Bangkal Cilacap. Untuk peserta yang hadir ada sekitar 200 orang," kata Desi Sianipar, M.Th, D.Th Dosen Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen PPs UKI dalam keterangannya.

Dijelaskan Desi Sianipar, bahwa kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini, dibagi dalam dua bagian, yaitu pertama, di GKJ Jeruklegi, dan dimana tim PkM menyampaikan materi-materi yang memperkuat kompetensi para guru Sekolah Minggu sehingga mereka dapat memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak Sekolah Minggu.

Menurut Desi Sianipar, melalui kegiatan ini mereka mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh Guru Sekolah Minggu, yakni kompetensi spiritual, kompetensi pedagogis, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian.

Di samping itu kata Desi, mereka juga dibekali pengetahuan dan motivasi untuk melakukan penilaian pembelajaran Sekolah Minggu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Mereka dimotivasi agar menyadari bahwa tanpa melakukan penilaian pembelajaran, mereka tidak akan pernah mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak Sekolah Minggu.

Desi menyatakan bahwa pelatihan ini juga diberikan kepada para keluarga muda di GKJ Bangkal dengan maksud supaya mereka mendidik anak-anak secara bertanggung jawab dan membentuk generasi unggul yang siap menghadapi segala tantangan di era bonus demografi.

"Kepada mereka, tim menyampaikan materi tentang bonus demografi dan tantangannya, generasi unggul yang siap menghadapi era bonus demografi, dan kolaborasi gereja dan keluarga muda dalam mempersiapkan generasi Kristen yang unggul," tandasnya.

Dari pengamatan, para peserta yang mengikuti pelatihan baik guru Sekolah Minggu maupun para keluarga muda, tampak begitu sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Mereka berefleksi mengenai proses mengajar anak-anak selama ini.

Bahkan banyak peserta yang sebelumnya tidak memahami bonus demografi dan tantangannya dalam kehidupan generasi muda, setelah kegiatan PkM ini menjadi paham apa yang harus mereka lakukan dalam mendidik anak-anak mereka.

Kegiatan PkM diakhiri dengan pelayanan khotbah dan pendalaman Alkitab di beberapa GKJ di sekitar Cilacap. (lian)

Hendri Jayadi Pandiangan : Dalam Menentukan Tersangka Hanya Perlu 2 Alat Bukti Saja, Sebagai Bukti Permulaan yang Cukup

Jakarta, SMN - Pemberitaan adanya dugaan korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) penerimaan mahasiswa yang menerpa Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. I Nyoman Gde Antara menjadi pemberitaan hangat di Denpasar maupun kalangan kampus. Untuk diketahui bersama di mana kasus ini mencuat dimana Hakim tunggal Agus Akhyudi yang menyidangkan praperadilan terkait status tersangka Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. I Nyoman Gde Antara dalam dugaan korupsi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) pada penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri menjadi perhatian banyak Publik maupun media massa.

Untuk diketahui bersama alur terkait Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. I Nyoman Gde Antara penetapan tersangka Rektor Unud, Prof. Antara dalam kasus korupsi dimana dimulai dari Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Mahasiswa Baru Seleksi Jalur Mandiri tahun Akademik 2018/2019-2022/2022, dimana tentunya berawal ada laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi di kampus terbesar di Bali ini. Selanjutnya, dengan penerbitan surat perintah penyelidikan dugaan korupsi SPI mahasiswa baru Unud tanggal 23 September 2022. Dalam proses penyelidikan ini telah dimintai keterangan 5 orang. Pada 18 Oktober 2022, penyidik menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan setelah melakukan gelar perkara.

Kemudian selanjutnya diterbitkan surat perintah penyidikan Nomor : Print-1139/N.1/Fd.2/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dan telah memeriksa saksi-saksi dan ahli serta memperoleh barang bukti yang sah. Penyidik lalu melakukan ekspose pada tanggal 11 Januari 2023, 7 Februari 2023. Lalu 3 Maret 2023 dan 7 Maret 2023 yang salah satu kesimpulannya telah diperoleh cukup bukti untuk menetapkan Prof Antara sebagai tersangka.

Sebagai Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Kejaksaan Tinggi Bali dalam Praperadilan di Pengadilan Negeri Denpasar Bali adalah Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, SH.,MH kepada Suara Media Nasional memaparkan, bahwa "Praperadilan itu sesuai ketentuan KUHAP pasal 1 angka 10 jo pasal 77 - 83, yang intinya adalah, kewenangan pengadilan negeri umtuk mengadili perkara : a) sah atau tidaknya Penangkapan dan Penahanan ; b) sah atau tidaknya surat perintah penghentian penyidikan atau surat perintah penghentian penuntutan; c) Gugatan ganti rugi dan rehabilitasi, ujarnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Suara Media Nasional (4/5/2023).

Hendri Jayadi Pandiangan

Dijelaskan Hendri yang juga sebagai Dekan Fakultas Universitas Kristen Indonesia, dalam pengembangannya paca putusan MK no 21 tahun 2014, obyek praperadilan diperluas yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.

"Untuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, yang diuji adalah syarat formil seseorang ditetapkan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu cukup dengan 2 alat bukti saja yang diatur dalam pasal 184 KUHAP. Walaupun pasal 184 KUHAP mengatur ada 5 alat bukti yaitu 1) saksi, 2) ahli, 3) surat, 4) petunjuk dan 5) keterangan terdakwa," bebernya.

Ditegaskan Hendri, bahwa dalam menentukan tersangka hanya perlu 2 alat bukti saja sebagai bukti permulaan yang cukup. Kualitas alat bukti yang digunakan dalam penyidikan itu hanya syarat fomil dan normatifnya saja. Misalnya kata Hendri, dalam pemanggilan saksi dengan menggunakan surat, kemudian dituangkan dalam berita acara saksi dan hal formil lainnya berdasarkan pasal 75 KUHAP.

"Jika ini terpenuhi maka penyidikan untuk menentukan tersangka oleh penyidik dianggap sah. Karena pembuktian secara materil dilakukan pada saat persidangan pemeriksaan pokok perkara," ungkap Praktisi Hukum ini menjelaskan.

Kaitan dengan laporan kerugian Negara lanjut Hendri, memang merupakan syarat untuk seseorang disangka melakukan tindak pidana korupsi yang dugaannya ada pasal 2 dan pasal 3. Sementara kata Hendri, untuk tindak pidana korupsi lainnya seperti suap menyuap, pemerasan dalam jabatan, penggelapan dalam jabatan yang tidak berhubungan dengan penggunaan keuangan negara tidak perlu laporan audit mengenai kerugian Negara, terangnya.

Kata Hendri Jayadi Pandiangan, adanya kaitan dengan kerugian negara tersebut memang saat ini banyak kontroversi yang terjadi, perbedaan pendapat antara penasehat hukum dengan penuntut umum. Ada yang berpendapat BPK yang memiliki kewenangan, sementara laporan audit kerugian negara yang buat BPKP atau audit internal.

"Untuk itu maka sesuai SEMA no 4 tahun 2016 ditegaskan, dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian Negara," pungkasnya. (lian)

Wabup Labusel Bertindak Sebagai Pemimpin Upacara Pada Peringatan Hardiknas Tahun 2023

Labusel, SMN - Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Ahmad Padli Tanjung Pimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2023 di Lapangan Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, Selasa (02/05/2023).

Mengawali sambutannya, Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Ahmad Padli Tanjung mengajak dalam momen Hardiknas ini agar lebih semangat untuk meneruskan perwujudan merdeka belajar.

"Meraih kemerdekaan dalam belajar jadi dambaan setiap insan pendidikan. Mari kita lanjutkan perjuangan Ki Hajar Dewantara demi kemajuan pendidikan Indonesia," sebutnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati meminta agar pencairan dana BOS dan Dana Indonesia juga lebih fleksibel digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

"Transformasi yang massif ini sudah sepantutnya kita rayakan dengan penuh syukur dan semarak, karena semua adalah hasil kerja keras dan kerja sama kita. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2023," jelasnya.

Turut hadir Forkopimda LabuhanbatuSelatan, Sekretaris Daerah Heri Wahyudi M, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD serta undangan lainnya. (jr)

Wabup Labusel pimpin upacara peringatan Hardiknas 2023

Plh. Sekdakab Labuhanbatu Gelar Rapat Persiapan Lomba Kampung KB Tingkat Nasional

Sekdakab Labuhanbatu gelar rapat persiapan lomba kampung KB tingkat Nasional

Labuhanbatu, SMN - Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Hasan Heri Rambe menghadiri Rapat Persiapan Lomba Kampung Keluarga Berkualitas (KB) tingkat Nasional Tahun 2023 di Ruang Rapat Bupati Labuhanbatu, Selasa (2/5/2023).

Dalam kesempatan ini sekda mengatakan untuk merangkum dulu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk penilaian Lomba Kampung KB dan untuk mencari tahu apa saja penilaian-penilaiannya, dan untuk membuat tabel sasaran dan kegiatan.

"Buat rencana kegiatan kampung KB dalam bentuk tabel, isinya kegiatan, ada sasarannya ada waktunya ada, untuk mengejar waktu penilaian," jelasnya.

Sekda menambahkan semua kepala OPD ini harus betul-betul saling bekerja untuk mencapai juara 1 nasional. Dirinya yakin, kalau Pemkab Labuhanbatu bekerja bersama-sama pada saat wawancara penilaian bisa baik.

Sementara itu, Ketua Pokja Pengembangan Kampung KB sekaligus Kepala Bappeda Labuhanbatu Hobol Zulkifli Rangkuti dalam paparannya mengatakan bahwa Kampung KB merupakan salah satu bentuk model miniatur pelaksanaan program Bangga Kencana yang bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholder instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

"Kampung Keluarga Berkualitas menjadi salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program Bangga Kencana dengan sektor pembangunan lainnya melalui intervensi program dari Lintas Sektor," ucapnya.

Adapun desa yang ditetapkan sebagai Kampung KB Tahun 2023 adalah Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu, untuk mewakili Sumatera Utara.

Kepala Dinas PPKB Kabupaten Labuhanbatu Mahrani mengatakan bahwa pada tahun 2018 Desa Pondok Batu sudah meraih kampung KB terbaik untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara dan pada tahun 2023 desa Pondok Batu kembali lagi ditetapkan menjadi kampung KB terbaik tingkat provinsi dan akan mewakili Provinsi Sumut untuk kampung KB tingkat Nasional.

Penilaian kampung KB selanjutnya akan dilaksanakan tahap wawancara pada tanggal 4 Mei 2023 secara daring, dan penilaian atau verifikasi lapangan dilaksanakan pada minggu ke-2 sampai dengan minggu ke-4 Mei 2023.

"Untuk mendukung penilaian Kampung KB kami mohon peran pemerintah daerah melalui OPD yang hadir untuk dapat membantu dalam pembinaan di Kampung KB dan memfasilitasi pembangunan dalam pengembangan Kampung KB," jelasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai rencana pengembangan Kampung KB dan sesi diskusi.

Turut Hadir dalam Rapat ini, Asisten I Pemerintahan Sarimpunan Ritonga Para Kepala OPD dan Perwakilan OPD, Perwakilan Dharma Wanita Persatuan Labuhanbatu, Perwakilan TP PKK Labuhanbatu, Staf di Bidang Terkait dan Hadirin Peserta Rapat Lainnya. (jr)

Beberapa Pengunjung Wisata Pandayangan Indah Tersambar Petir, 1 Orang Meninggal Dunia!

Labusel, SMN - Pengunjung objek wisata alam Pandayangan Indah yang terletak di Desa Ulu Mahuam, Kec. Silangkitang, Kab. Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara tersambar petir saat berada di lokasi wisata. Akibatnya satu orang meninggal dunia. Kamis, (27/4/2023).

Menurut data yang diperoleh ada tujuh korban yang tersambar petir satu diantaranya meninggal dunia. Korban yang meninggal inisial Alun (20 Tahun) warga Salingsing, Desa Ulu Mahuam, Kecamatan Silangkitang. Korban berada di lokasi wisata pada saat itu karena sedang membantu berjualan makanan. Naas tidak dapat ditolak, AN pemuda tersebut menjadi korban sambaran petir.

Sementara enam korban lainnya sedang dirawat di Puskesmas Aek Goti. Data enam korban yang sedang dirawat yaitu, Kasi 45thn/Sitapu-tapu, Siti Gordim 45thn/Salingsing, Aprianto 47thn/Baganbatu, Nurhaidah 40thn/Siluang, Aris 18thn/Siluang, Adam 32thn/Salingsing dan Agus Salim 49thn/Gunung Selamat.

Saat kejadian, kondisi cuaca di lokasi wisata sedang hujan. Sebelumnya para pengunjung sudah berteduh di salah satu warung di lokasi wisata pemandian tersebut.

Menurut keterangan dari beberapa pengunjung, saat sedang hujan itulah terlihat kilatan petir menyambar pohon kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari tempat perteduhan korban,Setelah itu mulai terdengar kegaduhan dengan teriakan-teriakan dengan mengatakan ada yang tersambar petir. Ternyata para pengunjung yang sedang berteduh di salah satu warung menjadi korban sambaran petir. Kejadiannya sekitar pukul 15.30 WIB.

Pada saat bersamaan Kanit Reskrim Polsek Silangkitang, Iptu F. Sigiro yang sedang melaksanakan Pam di lokasi wisata tersebut langsung melakukan tindak penyelamatan dengan membawa para korban ke Puskesmas Desa Aek Goti dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis pickup. Sebagian korban dibawa menggunakan ambulan puskesmas.

Korban meninggal yang dibawa ke Puskesmas Desa Aek Goti

"Saya disitu pada saat kejadian, lagi pengamanan. Lokasi wisatanya memang ramai dikunjungi. Begitu terdengar suara petir, langsung ada suara teriakan, Pak tolong ini ada yang kesambar. Lokasinya sekitar 20 meter dari tempat saya berteduh. Langsung saya cari mobil dan saya yang nyetir bawa korban ke Puskesmas Aek Goti," ucap Iptu. F. Sigiro.

Seluruh korban cedera saat ini sedang dirawat di Puskesmas Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Labusel.

Korban yang meninggal dunia telah diantar ke keluarganya dengan menggunakan mobil ambulan puskesmas. (jr)

MKKS SMP Negeri
se-Kabupaten Magetan
Mengucapkan :
Selamat Hari
Pendidikan Nasional (Hardiknas)
tanggal 2 Mei 2023
Ketua : Drs. Agus Sunadi, MPd

JAGADesign
Mengerjakan :
- Nota
- Banner
- Vandel
- Spanduk
- Souvenir
- Buku Yasin
- Kartu Nama
- Sablon Kaos
- Undangan Pernikahan
- Undangan Ulang Tahun
Dsn. Joho Ds. Sumberejo Kec. Ngasem Kab. Kediri
082231838798

Surat Kabar Umum
Suara Media Nasional
Bersama Membangun Daerah
Edisi 540/ XV / 8 - 21 Mei 2023

Bupati Karimun Pastikan Jalan dan Jembatan yang Rusak di Pulau Kundur Segera Diperbaiki

Bupati Karimun H. Aunur Rafiq saat melakukan peninjauan infrastruktur jalan dan jembatan di Pulau Kundur

Karimun, SMN - Bupati Karimun H. Aunur Rafiq melakukan peninjauan infrastruktur jalan dan jembatan di Pulau Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Kamis (27/4/2023).

Salah satu yang ditinjau adalah jembatan ruas jalan di Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat. Jalan tersebut amblas akibat hujan dengan intensitas tinggi atau lebat yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Bupati Karimun dalam peninjauan ini didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Karimun, Muhammad Firmansyah.

"Kita turun langsung untuk melihat 4 titik jalan dan jembatan yang dilaporkan rusak, salah satunya di Desa Kundur ini karena menjadi akses utama masyarakat," ujar Bupati.

Bupati mengatakan, keseluruhan jalan dan jembatan yang rusak akan segera diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karimun. Perbaikan ruas jalan tersebut diperkirakan akan memakan waktu paling lambat selama satu bulan.

"Perbaikan akan terfokus untuk peningkatan, kita akan sesuaikan lagi khususnya pada Box Culvert agar semakin kuat menghadapi tingginya debit air saat hujan lebat," kata Bupati.

Bupati juga menyampaikan permohonan maaf atas kerusakan yang terjadi, ia memastikan infrastruktur khususnya jalan adalah fokus utama untuk konektivitas masyarakat.

"Saya memohon maaf kerusakan ini membuat masyarakat jadi sulit dan harus memutar lebih jauh, peningkatan dan perbaikan jalan akan terus menjadi fokus kita agar konektivitas masyarakat semakin mudah," terang Bupati.

Bupati juga menyampaikan bahwasannya infrastruktur jalan memang menjadi fokusnya, hal ini sebagai komitmennya untuk pemerataan pembangunan hingga ke pelosok. Seperti halnya pembangunan infrastruktur jalan di masa kepemimpinannya yang sudah terbangun mencapai sepanjang 223,9 kilometer.

"Infrastruktur jalan sangat menjadi fokus dan komitmen kami untuk mendorong kemudahan dan ekonomi masyarakat, khususnya di Pulau Kundur peningkatan jalan terus dilaksanakan sampai saat ini. Begitu juga kecamatan lainnya," pungkasnya. (tbl)

Bupati Apresiasi Para Buruh di Kabupaten Karimun

Karimun, SMN - Bupati Karimun H. Aunur Rafiq menghadiri acara peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Gedung Nasional Karimun, Senin (1/5/2023) pagi.

Bupati Karimun H. Aunur Rafiq saat menghadiri acara peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day

Peringatan hari buruh di Kabupaten Karimun pada tahun ini diisi oleh berbagai kegiatan positif, diantaranya turnamen mini soccer antar perusahaan, donor darah, penyaluran bantuan sembako hingga puncaknya dialog interaktif di Gedung Nasional Karimun.

Puncak peringatan hari buruh ini dihadiri langsung oleh perwakilan para buruh dari berbagai organisasi atau serikat pekerja yang ada di Kabupaten Karimun.

"Saya mengucapkan selamat hari buruh internasional atau may day yang diperingati setiap tanggal 1 Mei kepada saudara-saudara kita para buruh, khususnya di Karimun," kata Bupati.

Bupati Aunur Rafiq dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada para buruh di Kabupaten Karimun. Hal ini dikarenakan momentum hari buruh tahun ini diperingati dengan menggelar berbagai kegiatan positif.

"Alhamdulillah tahun ini hari buruh diperingati dengan kegiatan positif seperti pertandingan bola hingga dialog interaktif ini, pemerintah daerah sangat mengapresiasi karena kegiatan tersebut tentunya membuat para buruh semakin kompak dan tali silaturahmi semakin kuat," terang Bupati.

Bupati kemudian berpesan kepada para pengusaha atau perusahaan yang ada di Karimun agar menjadikan hari buruh tahun ini sebagai momentum memperkuat hubungan baik bersama para buruh atau tenaga kerja.

"Bagi para pengusaha, mari membangun hubungan yang lebih baik dengan tenaga kerjanya. Perhatikan dan beri hak-haknya sesuai dengan aturan yang ada," ucap Bupati.

Sebaliknya, Bupati juga berpesan kepada para buruh agar senantiasa menjaga hubungan baik dengan perusahaan. Bupati bahkan meminta agar para buruh menjadikan perusahaan tempat bekerja sebagai rumah kedua.

"Jadikanlah perusahaan sebagai rumah kedua, dengan begitu ada rasa untuk bersama-sama. Sehingga terwujudlah hubungan yang baik dan harmonis," katanya.

Terakhir, Bupati meyakini hubungan baik antara perusahaan dan buruh atau tenaga kerja akan membangun hubungan industrial yang harmonis serta mendorong iklim investasi yang lebih baik. Mengingat kondisi dunia industri atau usaha yang harmonis akan mendorong minat investor, sehingga akan berdampak lahirnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Karimun.

"Kita terus berupaya agar hubungan industrial di Karimun selalu harmonis, kondusifitas tentu memberi dampak positif bagi iklim investasi di Karimun. Salah satunya terbukanya lapangan pekerjaan berkat kondisi investasi di Karimun yang baik dan harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja," pungkasnya. (tbl)

Wakil Bupati Karimun Tinjau Lokasi STQH Kepri ke-X

Karimun, SMN - Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim meninjau kesiapan lokasi untuk pembukaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang ke-X di Coastal Area Karimun, Rabu (26/4/2023) pagi.

Patut diketahui, Kabupaten Karimun ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan STQH Provinsi Kepri ke-X. Pembukaan acara akan dipusatkan di Coastal Area Karimun pada 9 Mei 2023 mendatang. Wakil Bupati (Wabup) Karimun Anwar Hasyim menyampaikan, peninjauan lokasi dilakukan untuk memastikan kesiapan jelang pembukaan STQH ke-X Tingkat Provinsi Kepri.

"Dari peninjauan ini kita mendudukan tentang bagaimana persiapan STQH ini bisa lebih sempurna, lebih nyaman dan lebih lancar. Hal ini dikarenakan kita berharap bisa sesempurna mungkin melaksanakan amanat sebagai tuan rumah tahun ini," ujar Wabup.

Wabup menyampaikan, dari hasil peninjauan tersebut ia meyakini Kabupaten Karimun sangat siap sebagai tuan rumah STQH Provinsi Kepri ke-X.

"Karimun insyaallah siap, kesiapan terus kita lakukan dan juga secara berkala. Karimun tentu akan berusaha semaksimal mungkin sebagai tuan rumah yang baik kepada qori-qoriah se-Provinsi Kepri," katanya.

Mengenai kesiapan kafilah atau qori-qoriah Kabupaten Karimun, Wabup menyebut mereka yang bertanding di STQH nantinya adalah yang terbaik dari pelaksanaan tingkat kabupaten sebelumnya.

"Kita sudah siapkan para qori dan qoriah terbaik kita, dalam waktu dekat TC juga akan dimulai. Pastinya mereka akan memberikan yang terbaik untuk mengharumkan Kabupaten Karimun," terang Wabup.

Wabup mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk menyukseskan STQH Tingkat Provinsi Kepri ke-X. Ia juga memohon dukungan dari seluruh masyarakat agar pelaksanaan ajang tahunan tersebut bisa berjalan sukses.

"Kami tentunya memohon dukungan seluruh masyarakat, keberhasilan acara pasti tidak terlepas dari kekompakan dan dukungan masyarakat. Semoga doa kita semua juga dapat menghantarkan Kabupaten Karimun sebagai juara, aamin," pungkasnya. (tbl)

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim saat meninjau kesiapan lokasi untuk pembukaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang ke-X

Tertarik Investasi di KEK Kesehatan dan Pariwisata, Perusahaan Singapura Kunjungi BP Batam

Batam, SMN - BP Batam menerima kunjungan sebuah perusahan asal Singapura yang mengutarakan minatnya untuk mengembangkan KEK Kesehatan dan Pariwisata yang terintegrasi, pada Jum'at pagi (4/5/2022).

Bertempat di Ruang Coffee Room Marketing, Perusahaan asal Singapura yang belum dapat disebutkan namanya tersebut, mengungkapkan Batam dengan lokasi yang sangat potensial dapat menjadi daerah tujuan baru _world-class medical tourism_ di wilayah Asia.

Melihat potensi tersebut, pihaknya secara serius ingin melakukan pembahasan terkait prosedur, prospek, fasilitas dan langkah awal yang harus dilakukan apabila perusahaanya ingin mengembangkan SEZ di Batam.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan perusahaan ini menawarakan konsep SEZ terintegrasi, yang di dalamnya terdapat sub industries, outlet, medical specialist, hotel, villa dan bagian lainnya yang saling terintegrasi dalam satu kawasan.

Hal ini pun sejalan dengan konsep pengembangan KEK Kesehatan Sekupang dan KEK Pariwisata Nongsa yang saat ini tengah disiapkan BP Batam.

"Minat investasi ini sejalan dengan harapan dari Kepala BP Batam Bapak Muhammad Rudi. Beliau berharap nanti Batam memiliki Premium Outlet di dalam sebuah Kawasan yang terintegrasi," kata Tuty.

"Apabila minat Singapura ini dapat terwujud, maka bisa kita bayangkan Batam akan semakin menggairahkan," tutup Tuty optimis.

Pihaknya menerima kunjungan ini didampingi oleh Kepala Pusat Pengembangan KPBPB dan KEK Irfan Syakir, Plt. Kabag Promosi Sofyan dan tim.

Kepala Pusat Pengembangan KPBPB dan KEK Irfan Syakir menyambut baik kunjungan dari Singapura ini. Dirinya siap menerima masukan dan membantu asistensi proses realisasi minat investasi ini.

Hal ini menurutnya sesuai dengan komitmen Kepala BP Batam Muhammad Rudi dalam mempercepat dan mendukung terbentuknya KEK Kesehatan Internasional Batam di Sekupang seluas 44,5 Ha, yang ke depan diproyeksikan dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk Kota Batam. (r/ph)

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait menerima kunjungan sebuah perusahan asal Singapura yang mengutarakan minatnya untuk mengembangkan KEK Kesehatan dan Pariwisata yang terintegrasi, pada Jum'at pagi (4/5/2022)

BP Batam Terima Kunjungan Investor Asal Singapura, Bahas Rencana Investasi Teknologi Transportasi

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menerima kunjungan dari Wigetworks Pte Ltd, calon investor asal Singapura, Kamis (4/5/2023).

Batam, SMN - BP Batam kembali menerima kunjungan dari Wigetworks Pte Ltd, calon investor asal Singapura, Kamis (4/5/2023).

Berlangsung di Gedung Marketing BP Batam, pertemuan lanjutan ini untuk membahas rencana investasi Wigetworks Pte Ltd terkait pengembangan teknologi transportasi di Kota Batam.

Dalam perencanaan ke depan, perusahaan yang bermaksud untuk meluncurkan sistem transportasi _marine craft_ tersebut bakal menggandeng Singapore Technologies (ST) Engineering jika investasi ini terealisasi.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menyambut baik rencana investasi ini demi peningkatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Batam ke depan.

Bahkan, kata Tuty, pihaknya pun turut mendampingi pihak perusahaan hingga ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia agar rencana investasi tersebut dapat terwujud.

"Mereka sudah pernah bertemu BP Batam sekitar 5 tahun lalu untuk penjajakan investasi sistem transportasi marine craft atau kapal terbang. Tapi karena pandemi Covid-19, sempat tertunda progres yang ada dan sekarang kita kembali membahasnya," ujar Tuty usai pertemuan.

Ia mengatakan, rencana Wigetworks Pte Ltd untuk berinvestasi di Kota Batam pun mendapat dukungan penuh oleh Singapore Economic Development Boards dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura.

"Pada intinya, mereka ingin tetap berinvestasi di Kota Batam dan akan melakukan pemutakhiran data, perizinan, dan lokasi terlebih dulu," beber Tuty lagi.

Dalam pertemuan tersebut, Tuty juga menyampaikan harapan dari Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, agar investasi yang akan berlangsung dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Batam.

Mengingat, ekonomi Batam tumbuh signifikan pada tahun 2022 lalu dengan capaian 6,84 persen atau hampir 7 persen.

Oleh sebab itu, kata Tuty, Muhammad Rudi ingin terus menggesa percepatan realisasi investasi ke depannya.

"BP Batam terus berupaya untuk meningkatkan realisasi investasi PMA. Kita harapkan dapat mendongkrak perekonomian Kota Batam," pungkasnya. (r/ph)

Bekas Kebakaran Bakal Disulap Jadi Taman Bermain

Tanjung Redeb, SMN – Lokasi bekas kebakaran di Jalan Kapten Tendean, Kelurahan Bugis direncanakan bakal dimanfaatkan sebagai taman bermain anak-anak.

Bupati Berau, Sri Juniarsih mengatakan, pemanfaatan lahan eks kebakaran tersebut dilakukan agar kawasan tersebut tidak terkesan kumuh. Taman bermain anak dinilainya cocok, pasalnya juga bersebelahan dengan wisata kuliner di sepanjang tepian Jalan Ahmad Yani. Sehingga menjadi bernilai luar biasa.

"Saya memiliki keinginan agar dibangun taman bermain anak di lokasi yang tepatnya bersebelahan dengan Dermaga Rajanta yang berada di ujung jalan itu. Desain di eks kebakaran itu akan dianggarkan," ujar Juniarsih.

Keinginannya itu juga didapatkannya berdasarkan hasil studi banding di Kabupaten Banyuwangi beberapa waktu lalu. Sehingga menurutnya juga perlu dicontoh di Berau.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat (Perkim) Berau, Murjani menjelaskan, tahun ini baru dianggarkan penyusunan dokumen pengadaan tanahnya lebih dulu. Sebab penataan tanah perlu dilakukan sebelum didesain menjadi kawasan yang diinginkan.

"Karena ada sebagian lahan milik masyarakat di sana. Jadi perlu kami ganti dulu untuk pembebasan lahan," jelas Murjani.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan Berau terkait pembebasan lahan tersebut. Adapun lahan potensial yang bisa dimanfaatkan yakni luasnya sekitar satu hektare saja. Itu dinilai cukup untuk dibuatkan desain taman bermain sekaligus ikon daerah Kabupaten Berau.

"Setelah pengadaan tanah selesai. Baru bisa kami desainkan dengan bagus oleh arsitek handal, sesuai dengan permintaan Bupati," terangnya.

Lokasi bekas kebakaran di Jalan Kapten Tendean Kelurahan Bugis bakal disulap menjadi menjadi taman bermain anak-anak

Tapi ditegaskannya, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Sebab ada kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Pariwisata) juga di dalamnya.

"Seperti yang bisa dilihat, ada dermaga dan turap di sana. Jadi butuh koordinasi dan kerja sama yang baik ke depannya untuk mendesain ikon daerah," tutupnya. (syah)

Presiden Jokowi Minta. . .

Sambungan dari hal. 1

tuk menggunakan jalur dengan kondisi yang buruk.

Presiden Jokowi pun merasakan langsung buruknya kondisi jalanan di Lampung yang selama ini menjadi sorotan.

Setelah melakukan kunjungan tersebut, Presiden Jokowi pun meminta warga untuk melaporkan jika masih ada jalan rusak di daerahnya.

"Infrastruktur jalan itu penting untuk mendukung arus mobilitas barang dan orang," tulis Presiden Jokowi dikutip dari Twitter @jokowi pada Jumat.

Bahkan warga bisa melaporkan kondisi jalan rusak melalui pesan langsung ke akun resmi sang presiden.

"Apabila jalan di daerah Anda masih rusak parah dan sudah lama tidak diperbaiki, sampaikan kepada saya melalui kolom komentar dan kirim video melalui pesan langsung di akun Twitter ini," tuturnya.

Dalam video yang dibagikan Presiden Jokowi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mendampingi Presiden Jokowi pun sampai menyindir kondisi jalanan di Lampung.

"Saya mendampingi Bapak Presiden, luar biasa jalannya. Ini kalau ada yang melahirkan, orang hamil bisa melahirkan Pak," kata Zulkifli Hasan.

Mobil Presiden Jokowi 'Tersangkut'

Momen ketika mobil Presiden Jokowi 'tersangkut' di jalanan Lampung viral di media sosial.

Salah satu videonya dibagikan oleh akun TikTok @umair_motoshop.

Dalam video tersebut terekam rombongan Presiden Jokowi yang sedang berhenti di jalan.

Mobil Mercedes-Benz S600 Guard hitam yang ditumpangi Presiden Jokowi disebut tersangkut oleh warga.

"Nyangkut mobilnya. Apalagi kita, Pak, tiap hari lewat sini," ujar seorang wanita yang merekam video tersebut.

Bahkan Presiden Jokowi sempat membuka pintu belakang sebelah kiri mobil yang membuat warga memanggil-manggil namanya.

Presiden Jokowi juga nampak mengecek kondisi bagian bawah mobilnya dan kembali menutup pintu.

Terdengar pula suara teriakan warga yang menyarankan mobil Presiden Jokowi didorong.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi di Jalan Terusan Ryacudu, Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.

Jalan tersebut merupakan akses menuju komplek Kota Baru Lampung.

Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin membantah kabar yang menyebutkan bahwa mobil Jokowi tersangkut di jalan rusak tersebut.

"Tidak nyangkut sama sekali. Itu karena berlubang, jadi pelan-pelan," kata Bey, kepada wartawan, Jumat (5/5/2023).

Perbaikan Jalan di Lampung oleh Pusat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan rusak di Provinsi Lampung.

Hal itu disampaikan Jokowi setelah mengunjungi sejumlah jalan rusak di Lampung, Jumat (5/5/2023).

Dikatakan Jokowi, masing-masing level pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota masing-masing memiliki tanggungjawab perbaikan jalan.

Namun, khusus Lampung, lantaran kondisi jalan rusak sudah cukup lama, perbaikan jalan diambil alih oleh pemerintah pusat.

Tahun ini, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran Rp 800 miliar untuk perbaikan 15 ruas jalan di Lampung.

"Tahun ini, pemerintah pusat, khusus Lampung, akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar untuk 15 ruas jalan termasuk ini," kata Jokowi saat meninjau ruas jalan di wilayah Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah, dikutip dari Breaking News KompasTV.

Jokowi menerangkan, proses perbaikan jalan itu akan dimulai pada bulan Juni mendatang karena akan diawali dengan proses lelang terlebih dahulu.

Meski demikian, mantan Wali Kota Solo ini menyatakan tidak seluruh perbaikan jalan diambil alih oleh pemerintah pusat.

"Ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawab pak Gubernur, pak Bupati. Jangan semuanya pemerintah pusat," ungkap Jokowi.(trb)

Gus Imin Apresiasi. . .

Sambungan dari hal. 1

ulangkan saudara-saudara kita dari Sudan," kata pria yang akrab disapa Gus Imin, Jumat (5/5).

Diketahui hingga saat ini proses evakuasi sudah berjalan sebanyak empat kali dengan total WNI yang sudah dipulangkan mencapai 929 orang. Gus Imin juga meminta pemerintah untuk tetap melakukan proses evakuasi kepada WNI yang masih terjebak di daerah konflik, mengingat berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Khartum, masih 280 WNI lainnya belum ada dievakuasi hingga saat ini.

"Ya secara bertahap harus terus dilakukan (evakuasi), kita harus memastikan mereka yang masih di Sudan aman dan selamat sembari menunggu proses evakuasi," ujar Gus Imin.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendorong Pemerintah memastikan kebutuhan WNI seperti keamanan dan ketersediaan fasilitas listrik dan air serta persediaan logistik yang mencukupi bagi WNI yang telah dievakuasi serta memberikan pelayanan pengobatan.

"Terutama untuk yang anak-anak ya, saya kira perlu trauma healing kepada anak-anak yang menjadi korban dalam konflik di Sudan sebelum mereka kembali ke kampung halaman," ujar Gus Imin.(lp6)

Kaltara akan Terbantu Devisa dari Kilang Mini LNG

Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang didampingi Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali dan Komisaris PT. Kayan LNG Nusantara Juanda Lesmana saat menandatangani prasasti peresmian kilang mini LNG di Kecamatan Tana Lia (30/4).

Tana Tidung, SMN - Gubernur Kalimantan Utara H. Zainal A. Paliwang didampingi Wakil Gubernur Yansen TP meresmikan Kilang mini Liquefied Natural Gas (LNG) yang berada di Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung, Ahad (30/4/2023). Kilang mini LNG milik PT Kayan LNG Nusantara ini, menjadi yang pertama di Indonesia.

Indonesia khususnya Kaltara akan terbantu dari pasokan energi dan devisa dengan hadirnya kilang mini LNG ini. Hal itu berdasarkan penghitungan produksi LNG kisaran 22 juta kubik per hari (MMSCFD). Jika selama 20 tahun dapat mencapai 154 MMSCFD.

Gubernur Zainal Arifin Paliwang pun berharap ke depan, PT Kayan LNG Nusantara dapat menambah kapasitas produksi. Yakni dengan membangun train kedua. "Tentunya kontribusi bagi Kalimantan Utara bertambah besar," katanya.

Selain itu, Zainal juga mengharapkan PT Pertamina dan Medco terus melakukan eksplorasi.

"Sehingga bukan hanya produksinya yang bertambah, namun kilang LNG ini juga dapat beroperasi dalam jangka waktu sampai dua puluh tahun bahkan lebih," sambungnya.

Perkembangan Kayan LNG, nantinya juga diharapkan berdampak kepada masyarakat sekitar. Berdampak pada sektor ekonomi, pendidikan, dan khususnya untuk kemajuan Desa Tanah Merah Barat.

Untuk itu, dirinya berharap dengan kehadiran kilang mini ini dapat menjadi contoh bagi investor di bidang energi baru yang terbarukan.

"Kaltara terus berakselerasi menjadi provinsi yang Berubah, Maju, dan Sejahtera dengan pembangunan yang adil dan merata. Mari kita terus bersama-sama berupaya mewujudkan pembangunan industri migas yang kompetitif untuk kemajuan kita di masa depan," ujarnya.

Sementara Direktur PT Kayan LNG Nusantara, Anthony Lesmana mengatakan, LNG yang nantinya akan diproduksi di pabrik ini akan dipasarkan ke pasar domestik dan juga untuk kebutuhan ekspor.

"Jadi pemanfaatan gas dengan skema mini LNG ini kami harapkan dapat menjadi percontohan untuk pemanfaatan gas lainnya di remote area atau kawasan marginal lainnya," katanya.

Diketahui pembangunan Kilang Mini LNG ini menelan biaya hingga Rp2 triliun. Oleh sebab itu ia berharap dukungan dari SKK Migas, PT. Pertamina, PT. Medco untuk secara konsisten menyuplai gas ke Kilang Mini minimal 22 MMSCFD selama 20 tahun.

"Jika para produsen dan penjual gas mampu menaikan produksi gas dari wilayah kerja Sei Manggaris," imbuhnya.

Pabrik ini memiliki kapasitas produksi sebesar 500 ton LNG per hari. Selain LNG, pabrik ini memproduksi LPG maupun kondensat yang dipasarkan menggunakan iso tank.

"Untuk tahap awal ini kami akan menggunakan 700 iso tank untuk memasarkan produk kami," pungkasny.

Walaupun teknologi yang digunakan pabrik ini berasal dari China, tetapi ia memastikan akan adanya transfer pengetahuan. Untuk saat ini lebih dari 50 persen tenaga kerja PT. Kayan LNG Nusantara berasal dari sekitar lokasi pabrik yakni Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan. (dkisp/syah)

Kadis Kominfo Kabupaten Asahan Tanggapi Berita Pembangunan Menara Masjid Agung H. Achmad Bakrie Kisaran

Asahan, SMN - Menanggapi pemberitaan disalah satu media, terkait rencana Pembangunan Menara Masjid Agung H. Achmad Bakrie Kisaran, yang dianggarkan sebesar Rp 20 M. Bupati Asahan melalui Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan Syamsuddin, di ruang kerjanya, Kamis (20/04/2023) angkat bicara mengenai hal tersebut.

Kadis Kominfo mengatakan, pembangunan Menara Masjid Agung ini merupakan salah satu perwujudan dari beberapa program prioritas Pemerintah Kabupaten Asahan yakni, Asahan Religius, Asahan Go Wisata dan Infrastruktur kuat. Selain itu Syamsuddin mengatakan, pembangunan Menara Masjid ini bukan tanpa perhitungan, tetapi sudah melalui perencanaan yang matang.

"Dibangunnya Menara Masjid Agung H. Achmad Bakrie Kisaran ini sudah melalui perencanaan yang matang, menara ini sejatinya akan menambah keindahan dari Masjid tersebut, sehingga banyak masyarakat baik dari dalam maupun luar Kabupaten Asahan berkunjung melihat objek wisata religi ini.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan Syamsuddin

Dengan banyaknya masyarakat yang berkunjung ke salah satu ikon Kabupaten Asahan ini, diharapkan PAD Kabupaten Asahan akan meningkat," ucapnya.

Syamsuddin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan juga telah menganggarkan pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan kesejahteran masyarakat, karena hal ini juga menjadi bagian dari program prioritas Pemerintah Kabupaten Asahan dibawah kepemimpinan Bupati Asahan H. Surya dan Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar.

Terakhir Syamsuddin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Asahan yang telah membantu Pemerintah Kabupaten Asahan mensukseskan visi dan misinya baik melalui sumbangsih langsung, maupun melalui kritik dan saran yang membangun.

Semoga dengan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dapat membantu Mewujudkan Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter. (in)

Dewan Pers. . .

Sambungan dari hal. 1

pada media, Rabu, 3 Mei 2023.

Menurut dia, digitalisasi yang sedemikian masif berpotensi melumpuhkan jurnalisme berkualitas. Media siber Tanah Air punya pekerjaan rumah besar dalam menjaga jurnalisme berkualitas.

"Maka, media siber harus menahan diri untuk tidak terjebak pada klikbait atau terseret arus pasar yang menggadaikan kualitas demi menambah pendapatan yang dikonversi dari jumlah klik," ucap Ninik.

Dia menekankan independensi adalah kunci. Termasuk, dari dominasi platform digital yang menilai jumlah klik lebih berharga untuk dikonversi sebagai penghasilan ketimbang akurasi.

Menurutnya, kemerdekaan pers bukan hanya menghendaki situasi terbebasnya wartawan dan perusahaan pers dari kekerasan dan ancaman kekerasan. Kemerdekaan pers juga harus dimaknai terpenuhinya situasi independensi dan kemandirian perusahaan pers agar tetap mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas.

Terganggunya kemerdekaan pers, akan memperlamban bahkan mematikan demokrasi. Oleh karena itu multistakehoders harus terlibat. Tidak hanya jurnalis dan perusahaan media, tetapi juga pemerintah, unsur swasta, bahkan individu-individu yang harus ikut membangun ekosistem kemerdekaan pers," ujar dia.(medcom)

Menteri Hadi Sebut. . .

Sambungan dari hal. 1

tipikat tanah wakaf, serta sertipikat untuk rumah ibadah di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

"Sejak tahun 2017 sampai 2023 ini, PTSL telah memberikan nilai ekonomi sebanyak kurang lebih Rp5.219 triliun. Artinya ini adalah indikasi perekonomian rakyat sedang berkembang," ucap Hadi Tjahjanto dalam sambutannya, Jumat (5/5/2023).

Lebih lanjut Hadi menyampaikan bahwa diantara nilai tambah itu, Kabupaten Sidoarjo berkontribusi sebesar ±Rp 160 miliar yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Hak Tanggungan sejak tahun 2020.

Di sisi lain, Hadi juga menyoroti perihal tanah rumah ibadah dan wakaf yang ditargetkan selesai pada 2024. Jika seluruh rumah ibadah telah disertipikatkan maka bisa dengan mudah menyampaikan data jumlah seluruh rumah ibadah yang ada di Indonesia.

"Program penyertifikatan tanah wakaf terus kita lakukan sampai dengan akhir 2024. Saya telah meminta kepada Pak Kepala Kanwil untuk segera mendata semua masjid, rumah ibadah lainnya, agar lebih mudah di monitor mana yang belum tersertipikasi," tutur Hadi Tjahjanto.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdor Ali turut hadir dalam kesempatan itu menyampaikan kebanggaannya terhadap program PTSL. Ia meminta kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk menambah program PTSL di Kabupaten Sidoarjo.

"Pak Menteri, mohon PTSL di Sidoarjo ini ditambah, karena itu sangat berdampak baik buat kami," ungkap Bupati Sidoarjo. (kmp)

DPRD Gelar Rapat Paripurna Rekomendasi Terhadap LKPj Gubernur Kaltara Tahun 2022

Tanjung Selor, SMN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Paripurna ke 10 Masa Persidangan I Tahun 2023, dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD dan penyampaian rekomendasi DPRD Kaltara terhadap Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran (TA) 2022.

Mewakili Gubernur Drs. H. Zainal A. Paliwang, Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP, dalam sambutannya memberikan apresiasi serta ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian sangat tinggi, yang telah diberikan ketua beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Kaltara.

"Atas nama Pemprov Kaltara, memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih. Perhatian dari jajaran DPRD selaku representasi dari warga masyarakat Kaltara ini, tentu menjadi pemacu semangat bagi saya dan seluruh jajaran Pemprov Kaltara, untuk semakin giat membangun dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kaltara tanpa terkecuali," ujar Wagub Yansen TP, Senin (18/4/2023).

Diketahui, bahwa laporan LKPj kepala daerah, merupakan kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 13/2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus saat menyerah dokumen rekomendasi Pansus LKPj kepala daerah tahun 2022 kepada Wakil Gubernur dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kaltara (18/4)

LKPj, kata Wagub, disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD, yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Penyampaian LKPj ini telah kita laksanakan, pada rapat paripurna DPRD Provinsi Kaltara, Selasa (28/3/2023) lalu. Dan, pada hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan pendapat akhir franksi-fraksi DPRD serta rekomendasi DPRD Provinsi Kaltara terhadap LKPj Gubernur Kaltara TA 2022," tutur Yansen.

Wagub mengungkapkan, jika pembahasan dan rekomendasi LKPj merupakan amanat dari PP No. 13/2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) No. 18/2020, yang menyebutkan bahwa DPRD memiliki kewajiban untuk melakukan pembahasan LKPj dan menerbitkan rekomendasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Kaltara, yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) melalukan evaluasi ke lapangan yang kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan pembahasan atas laporan LKPj. Dan pada akhirnya menghasilkan sejumlah rekomendasi dan catatan strategis sebagai bahan dalam penyempurnaan penyelenggaraan pada masa yang akan datang," ujar Yansen.

Untuk itu, terkait hal tersebut Pemprov Kaltara akan segera menindaklanjuti dan menyampaikan tanggapan atau jawaban berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan.

"Kami juga akan segera merumuskan kebijakan strategis yang akan di implementasikan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun berjalan dan tahun berikutnya. Baik itu dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran, maupun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah," tutup Wagub. (dkisp/syah)

JAGADesign
Mengerjakan :
- Nota
- Banner
- Vandel
- Spanduk
- Souvenir
- Buku Yasin
- Kartu Nama
- Sablon Kaos
- Undangan Pernikahan
- Undangan Ulang Tahun
Dsn. Joho Ds. Sumberejo Kec. Ngasem Kab. Kediri
082231838798

Surat Kabar Umum
Suara Media Nasional
Bersama Membangun Daerah
Edisi 544/ XV / 8 - 14 Mei 2023

Gubernur Khofifah Kawal RUU Kesehatan Agar Pelayanan Kesehatan Tetap Berjalan Baik

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua IDI Jatim sekaligus perwakilan dari para organisasi profesi bidang kesehatan Dr dr. Sutrisno, SpOG (K)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa foto bersama usai berdialog dengan lima organisasi profesi tenaga kesehatan (nakes) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa foto bersama usai berdialog dengan lima organisasi profesi tenaga kesehatan (nakes) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan

Surabaya, SMN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berdialog dengan lima organisasi profesi tenaga kesehatan (nakes) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Kelima organisasi profesi tersebut ialah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di Gedung Negara Grahadi, Kamis (4/5/23).

Upaya dialog ini dilakukan Gubernur Khofifah setelah mengetahui adanya rencana aksi damai yang rencananya dilakukan oleh lima organisasi profesi tenaga kesehatan se-Indonesia pada tanggal 8 Mei 2023 yang akan dilaksanakan di Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah meminta seluruh dinas kesehatan, rumah sakit, asosiasi rumah sakit dan organisasi profesi serta tenaga medis/kesehatan di Jatim agar tetap memberikan pelayanan kesehatan di Jatim dengan baik seperti biasanya.

"Saya menerima banyak flyer tentang ajakan aksi damai dengan logo organisasi profesi Kesehatan tertulis mulai tanggal 7 Mei. Kemudian tanggal 8 Mei akan aksi damai di Gedung DPR/MPR. Kemudian rencana dalam waktu tertentu antara tanggal 17-20 Mei 2203 ada rencana untuk penghentian pelayanan Kesehatan tertentu," ujarnya.

Prinsipnya saya sangat menghormati proses demokrasi dan penyampaian aspirasi dari semua elemen.

"Tetapi jika terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat, saya minta betul-betul dipikirkan kembali dampaknya. Mengingat proses pelayanan Kesehatan yang selama ini berjalan sudah luar biasa manfaatnya untuk masyarakat," tambahnya.

Ditegaskan Gubernur Khofifah, dalam menyalurkan aspirasi mohon pelayanan kesehatan agar tetap berjalan baik . Ini sangat penting karena hal ini memastikan tidak ada masyarakat Jatim yang terganggu haknya untuk mendapatkan pelayanan medis yang optimal.

"Jangan sampai dalam proses mengawal demokrasi ini kita membuat masyarakat menjadi fihak yang dirugikan," ujar Khofifah

Lebih lanjut, Khofifah juga menghargai bahwa proses penyampaian pendapat yang akan dilakukan organisasi profesi kesehatan terkait RUU kesehatan. Sebab, Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana ruang untuk menyuarakan pendapat sangat terbuka.

"Dari poin itu, kami menilai proses demokrasi di buka ruang seluas-luasnya," jelasnya.

Gubernur Khofifah bahkan menawarkan untuk membuka jalur penyampaian pendapat sesuai dengan jalur yang konstitusional. Tawaran bertemu dengan Menkopolhukam, kata Gubernur Khofifah, merupakan salah satu opsi yang solutif jikalau ada poin-poin yang masih perlu diperjuangkan.

"Ada waktu untuk bisa menyampaikan hal-hal krusial atau poin dari pihak organisasi kesehatan. Misalnya berdialog dengan Menkopolhukam Pak Mahfud MD atau Menko PMK Muhadjir Effendy yang juga sama-sama dari Jatim supaya ada titik ketemunya dan mampu membawa perubahan yang konkrit," ujar Gubernur perempuan pertama Jatim ini.

Menurutnya, penawaran untuk bertemu dan berdialog dengan petinggi di pemerintahan pusat juga selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan bagian reformasi bidang pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Selain itu, merangkum ide yang masih bisa dikomunikasikan kepada pimpinan di pemerintah pusat sehingga ada hal-hal yang sangat substansial untuk dibahas organisasi kesehatan.

"Jadi ini berseiring dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk memaksimalkan ikhtiar panjenengan semua. Masih ada peluang untuk negosiasi atau berkomunikasi," tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Dr. Erwin Ashta Triyono SpPD-KP-TI mengatakan, kelima organisasi yang ikut mengawal aksi damai terkait RUU Kesehatan tetap memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal bagi masyarakat.

"Alhamdulillah, Dari 5 organisasi profesi menyatakan tidak ada yang namanya penghentian pelayanan. Jadi pelayanan tidak terganggu dengan adanya dinamika RUU kesehatan. Semua harus berjalan dengan baik," kata Erwin.

Dirinya pun berterima kasih kepada Gubernur Khofifah yang mau mendengar, memfasilitasi sekaligus menjembatani aspirasi-aspirasi dari kelima organisasi profesi kesehatan terkait RUU kesehatan.

"Minimal ibu sudah menginstruksikan, membicarakan dengan sebaik-baiknya dan memaksimalkan semua kanal termasuk mengkomunikasikan dengan Menkopolhukam sehingga diharapkan makin banyak yang lebih memahami isu RUU kesehatan ini," urainya.

Sementara itu ketua IDI Jatim sekaligus perwakilan dari para organisasi profesi bidang kesehatan, Dr dr. Sutrisno SpOG (K) menegaskan bahwa isu terkait penghentian layanan masyarakat pada prinsipnya tidak akan terjadi. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tetap menjadi prioritas.

"Tidak akan ditunda, tidak dikesampingkan ke lain waktu. Jadi semua berjalan seperti biasa bahkan akan menjadi motivasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Sehingga Masyarakat tidak perlu khawatir terkait adanya isu penundaan pelayanan" tegasnya.

Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Khofifah karena diberi ruang untuk urun rembuk. Menyampaikan ide-ide terkait RUU Omnibuslaw bidang kesehatan untuk kepentingan, keselamatan pasien dan masyarakat adalah prioritas utama.

"Kami juga akan support penuh dan bersama dengan pemerintah daerah untuk memberikan masukan-masukan tentang RUU bidang kesehatan," ujar Sutrisno

Dukungan kepada pemerintah, kata Sutrisno bakal diwujudkan melalui masukan yang konkrit dan positif melalui kanal-kanal constitutional yang tersedia. Bahkan tadi Gubernur Khofifah menyampaikan untuk memfasilitasi organisasi profesi bertemu dengan Menkopolhukam.

"Kami sangat senang dan bersyukur. Tentu apabila momentum pertemuan itu terjadi, kami akan menyampaikan semua ide-ide realistik terkait pasal-pasal yang menjadi 'masalah' buat kita semua sehingga ke depan didapatkan RUU Kesehatan yang komplit agar bermanfaat untuk bangsa dan negara," pungkasnya. (*)

Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Inspirator Gerakan Vokasi Jawa Timur

Surabaya, SMN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan sebagai Inspirator Gerakan Vokasi Jawa Timur dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

Penghargaan tersebut diterima Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mewakili Gubernur Khofifah saat mengikuti Kick-off Capacity Building KADIN Jawa Timur di Grand Dafam Signature Hotel Surabaya pada Jumat (5/5).

Penghargaan KADIN tersebut diberikan lantaran Gubernur Khofifah dinilai memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan motivasi dan dukungan terhadap perkembangan dan kualitas pendidikan vokasi dan kejuruan di Jawa Timur.

Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KADIN yang telah ikut mendukung upaya peningkatan SDM di Jatim. Menurutnya, pendidikan vokasi akan memiliki kualitas yang baik jika terjadi keselarasan dengan kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja (Dudika).

"Saya menyampaikan terimakasih pada KADIN Indonesia beserta jajaran KADIN Jawa Timur yang memberseiringi langkah kami di Pemprov Jatim untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga kerja trampil dari Bumi Majapahit," ungkapnya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (6/5).

Orang nomor satu di Jatim itu menegaskan, penguatan pendidikan vokasi merupakan salah satu ikhtiar penting untuk melahirkan tenaga terampil dan mengurangi angka pengangguran.

Salah satu langkah yang dilakukan yaitu melakukan sinergitas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dengan Pemprov melalui penyelarasan kurikulum dan pengembangan pendidikan vokasi yang selaras dengan tuntutan Dudika.

"Kami terus bersinergi dengan Kadin Jatim. Nantinya bisa dilakukan sinergitas yang lebih intens antara KADIN dan pelaku-pelaku usaha di lingkungan KADIN serta Pengusaha di Jatim serta tim dari Pemprov. Apalagi kalau ada intervensi dari Pendidikan vokasinya," ujar Gubernur Khofifah.

Kadin Jatim sendiri, lanjutnya, memiliki Rumah Vokasi yang terletak Gresik ini mampu berkontribusi besar terhadap peningkatan ketrampilan dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), khususnya bagi lulusan SMK di Jawa Timur.

Diketahui, rumah Vokasi tersebut berdiri atas inisiasi Kadin Jatim untuk memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi tambahan bagi pelajar SMK Jatim.

"Rumah Vokasi ini akan memberikan dampak lebih signifikan bila mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Terlebih apabila mampu membangun kerjasama dengan Fakultas Vokasi serta dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja," kata Khofifah.

"Jadi tingkat pengangguran terbuka dari SMK di Jawa Timur sudah di bawah 1 digit, kalau ada rumah vokasi di sini, Insyaallah akan berdampak lebih signifikan pada penurunan TPT khususnya lulusan SMK di Jatim, termasuk di Gresik ini," ujarnya.

Lebih lanjut ditambahkan, pengangguran SMK di Jawa Timur mengalami penurunan yang signifikan dan tidak lagi menjadi TPT tertinggi menurut pendidikan. Dimana, pada tahun 2020 TPT SMK Jatim di angka 11,89, kemudian tahun 2021 di angka 9,54, dan terus menurun hingga pada tahun 2022 di angka 6,70.

Disamping itu, nilai TPT Jatim juga selalu di bawah nasional untuk tahun 2022 yaitu di angka 5,49 dan nasional di angka 5,86. Sementara berdasarkan data BPS per Februari 2023 TPT Jatim di angka 4,33, sedangkan nasional di angka 5,45 untuk periode yang sama.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga menunjukkan dukungannya terhadap pendidkan vokasi. Yang mana, Dinas Pendidikan Jawa Timur menggelar Expo Dan Expose SMK-PK (SMK Pusat Keunggulan). Sebanyak 204 SMK PK di Jatim unjuk karya inovasi SMK untuk menarik DUDIKA maupun menjadi entrepreneur.

"Saya berharap semua SMK Pusat Keunggulan dapat mengimbaskan program-programnya ke seluruh lembaga SMK di Jawa Timur yang berjumlah 2.150 SMK. Terdiri dari 298 SMKN dan 1.852 SMK swasta," papar Khofifah.

"Program unggulan Kemdikbud Ristek ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan sesuai tuntutan dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Dinas pendidikan Jatim pun mewadahi SMK-PK di Jatim melalui Public Expo dan Expose ini," tambahnya.

Khofifah berpandangan bahwa SMK-PK dapat menjadi solusi dari permasalahan ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran terbuka. Ia juga menambahkan jika SMK-PK harus mau berbagi dalam penggunaan peralatan dan sarana pembelajaran yang dibutuhkan SMK lain.

Menurut Khofifah, pembangunan dan penguatan pendidikan vokasi ini selayaknya tak cuma berhenti pada kualitas dan kuantitas, tetapi juga kualifikasi atau sertifikasi terkait bagaimana kemampuan sumber daya manusia Jatim bisa mendapat pengakuan sesuai standar internasional.

"Recognition of international qualification adalah hal yang krusial. Ini penting agar tenaga kerja kita bisa bersaing dan dikenal di dunia internasional. Pengembangan tenaga kerja ini tidak cuma soal kuantitaa dan kualitas tapi juga sertifikasi dan pengayaan agar bagaimana mereka bisa di rekognisi," paparnya.

Apalagi, Indonesia kini menyandang posisi Ketua ASEAN. Atas hal itu, sumber daya manusia Jawa Timur diharapkan bisa bersaing dengan tenaga kerja dari negara ASEAN lain, seperti Singapura dan Malaysia.(*)

Buka PKA Angkatan IV dan V Tahun 2023, Gubernur Khofifah Pesankan Implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak Tematik dengan Prioritas 4 Aspek

Surabaya, SMN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan (PKA) IV dan IV Tahun 2023 dan Halal Bihalal di Kantor BPSDM Provinsi Jawa Timur, Jumat (5/5/23).

Di kesempatan ini, Gubernur Khofifah berpesan untuk memastikan reformasi birokrasi berdampak secara tematik fokus pada empat hal penting.

"Pada penghargaan SPBE lalu, oleh Menteri PANRB, Jatim meraih Digital Goverment Award 2023. Namun, diberikannya penghargaan tersebut bukan hanya sekedar bagaimana digitalisasi berperan dengan baik melainkan juga pada dampaknya lewat 4 aspek strategis" jelas Khofifah.

Pertama, bagaimana Reformasi Birokrasi berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan. Dalam hal ini, tata kelola birokrasi mengakselerasi penurunan kemiskinan dengan berbagai ekosistemnya. Termasuk didalamnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, Reformasi Birokrasi Peningkatan Investasi. Dimana pada RB ini memperkuat penerapan omnibus law, meningkatkan competitiveness index, untuk melipatgandakan investasi pada suatu daerah.

"Saat ini kita lakukan bagaimana upaya peningkatan ivestasi baik dari dalam maupun luar negeri. Inilah mengapa, Jawa Timur rutin menyelenggarakan Misi Dagang danni vestasi di berbagai daerah. Saat ini total sudah ada 30 daerah dan 32 kali misi dagang dan investasi dilaksanakan," papar Gubernur Khofifah.

"Karena kekuatan industri manufaktur di Jawa Timur ini mendekati 32%, maka banyak daerah yang mengirimkan raw material (bahan mentah) untuk diolah di Jatim lalu, dibawa kembali ke tempat asalnya atau untuk eksport. Ini menjadi peluang bagi Jawa Timur yang secara nilai industri manufaktur cukup handal ," lanjutnya

Ketiga, RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden. RB ini menegaskan tata kelola birokrasi merespons hal-hal mendesak sesuai arahan Bapak Presiden, sehingga dapat memitigasi risiko yang berdampak serius pada masyarakat.

Keempat, RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Khofifah menjelaskan, digitalisasi berbasis arsitektur SPBE menjadi pilar bagi program Reformasi Birokrasi Tematik yang berdampak luas bagi masyarakat.

Lebih jauh, Khofifah sapaan lekatnya mengatakan bahwa dalam upaya menerapkan reformasi birokrasi digitalisasi administrasi pemerintahan, penting untuk tetap melakukan cek dan recek serta detail.

"Jadi meski cara kerja kita sudah menerapkan digital IT, kita harus tetap punya pola kerja untuk cek dan detail. Cek detail, cek detail dan cek detail. Selain itu, update data juga penting. Karena dalam upaya perencanaan ke depan kita perlu data paling baru untuk menjamin proyeksi ke depan supaya bisa konkrit," katanya.

"Pastikan bahwa kinerja kita semua harus berdampak pada 4 aspek tersebut. Karena 4 hal ini akan menjawab isu nasional dan global. Ini harus dicamkan oleh seluruh peserta PKA," tegasnya.

Ia juga memesankan agar masalah update data tersebut menjadi perhatian semua pihak baik yang ada di pemerintahan kabupaten kota maupun yang ada di provinsi. Sebab ditegaskan mantan Menteri Sosial ini, agregasi dan integrasi data menjadi sangat penting agar bisa saling ada keterbukaan dan saling update data di masing-masing instansi.

"Karena masih banyak yang punya mindset kalau punya data cenderung ditutup . Kita harus saling konfirmasi data satu sama lain," tegasnya.

Tidak sampai di situ saja, Gubernur Khofifah juga menyampaikan pada seluruh peserta bahwa konfirmasi data atas kinerja kepada sektor terkait harus diperkuat sinerginya.

Di akhir, Khofifah juga secara resmi membuka gelaran PKA.

"Dengan mengucap Basmallah, Bismillahirrohmanirrohim, Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan IV dan V Tahun 2023 saya nyatakan resmi dibuka," tutupnya. (*)